

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**HASNAWATI
NIM 105730475514**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

HASNAWATI

105730475514

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah dengan judul “ analisis kinerja keuangan badan pendapatan daerah povinsi Sulawesi selatan”. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya ilmiah ini untuk orang tuaku tercinta dan saudaraku yang selalu mendukung dan memberi saya motivasi selama saya meuntut ilmu hingga sampai sekarang. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pembimbing yang senantiasa tanpa bosan memberikan saya arahan dan saran sehingga memudahkan saya dalam penyusunan skripsi, dan seluruh dosen yang tidak pernah berhenti memberikan ilmunya, dan tak lupa juga sahabat seperjuangan kelas Ak.4 -14 yang selalu memberikan motivasi dan selalu kompak.

MOTTO HIDUP

“ Hal yang paling menyakitkan didunia ini adalah ketika kita tidak bisa
membahagiakan kedua orang tua kita “.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan".
Nama Mahasiswa : Hasnawati
No. Stambuk/NIM : 105730475514
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan di ujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (1) pada tanggal 22 Desember 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 22 Desember 2018

Menyetujui,


Pembimbing I,

Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M
NIDN. 0922027901

Pembimbing II,

Hasanuddin, SE., MSi
NIDN. 0901067602

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,
Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903-078

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar




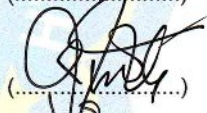



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **HASNAWATI, NIM : 105730475514**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1440 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM.Ak.CA.CPA (.....) 
2. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si.Ak.CA (.....) 
3. Mira, SE., M.Ak.,Ak (.....) 
4. Hasanuddin, SE., M.Si (.....) 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasnawati
Stambuk : 105730475513
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah
Privinsi Sulawesi Selatan".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018

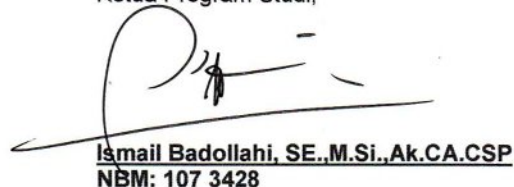
Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi,



ABSTRAK

HASNAWATI, 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Povinsi Sulawesi Selatan.* Dibimbing oleh Bapak Edi Jusriadi, dan Bapak Hasanuddin, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, universitas muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan badan pendapatan daerah provinsi sulawawesi selatan dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun anggaran 2013-2017 terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan.

Kata Kunci :kinerja keuangan badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan

ABSTRACT

HASNAWATI, 2018. *Financial Performance Analysis of the South Sulawesi Regional Revenue Agency*. Supervised by Mr. Edi Jusriadi, and Mr. Hasanuddin, Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar.

This research was carried out on the South Sulawesi provincial revenue agency. The purpose of the research is to find out how the financial performance of the provincial revenue agency in South Sulawesi uses regional financial ratio analysis.

This study uses financial ratio analysis consisting of regional financial independence ratios, effectiveness ratios, growth ratios.

Based on the results of this study it can be concluded that the ratio of regional financial independence ratio of effectiveness, growth ratio, South Sulawesi province regional income agency 2013-2017 fluctuations in increase and decrease.

Keywords: financial performance of the South Sulawesi provincial revenue agency

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSEMBAHAN	III
ABSTRAK	IV
HALAMAN PERSETUJUAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	IX
DAFTAR GRAFIK	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori	6
1. kinerja keuangan.....	6
a. Pengertian kinerja keuangan	6
b. Pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah	6
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
4. Rasio Keuangan.....	15
a. Pengertian rasio keuangan	15
b. Jenis rasio keuangan	15
B. Tinjauan Empiris	17

C. Kerangka Pikir.....	28
D. Hipotesis	30
1. Rasio anggaran dengan kinerja keuangan	30
2. Rasio efektivitas dengan kinerja keuangan	31
3. Rasio kemandirian keuangan daerah	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Lokasi dan waktu penelitian	34
B. Teknik pengumpulan data.....	34
C. Definisi Operasional.....	34
D. Jenis dan sumber data.....	36
E. Populasi Dan Sample.....	36
F. Metode analisis data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran umum Bapenda.....	38
1. Sejarah singkat Bapenda.....	38
2. Visi dan misi	40
3. Struktur organisasi bapenda.....	41
B. Penyajian data	46
1. Hasil data	46
2. Pembahasan	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Nomor	judul	halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	pemungutan pajak.....	47
Tabel 3.2	pemunutan pajak	48
Tabel 3.3	pemungutan pajak.....	49
Tabel 3.4	pemunutan pajak	50
Tabel 3.5	pemungutan pajak.....	51
Tabel 3.6	pemungutan pajak.....	52
Tabel 3.7	retribusi daerah	53
Tabel 3.8	retribusi daerah	54
Tabel 3.9	kriteria kinerja keuangan rasio kemandirian keuangan daerah	55
Tabel 3.10	kriteria kinerja keuangan rasio efektivitas.....	56
Tabel 3.11	kriteria kinerja keuangan pertumbuhan	58
Tabel 3.12	rekapitulasi rasio keuangan daerah.....	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka pikir	29
Gambar 3.1	struktur Bapenda	41

DAFTAR GRAFIK

Nomor	judul	halaman
5.1	grafik rasio kemandirian keuangan daerah ...	60
5.2	grafik rasio efektivitas	62
5.3	grafik rasio pertumbuhan	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia “mereformasi” berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan Negara dan daerah.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun bukan berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Pertimbangan yang mendasari perlunya otonomi adalah perkembangan kondisi didalam dan luar negeri. Sehingga kemampuan pemerintah daerah ini

diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya, kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Akuntansi pemerintahan keuangan daerah merupakan jenis akuntansi, maka pemerintah dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan pelaporan, transaksi-transaksi yang terjadi di pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang terjadi di pemerintah daerah. Maka dari itu analisis kinerja laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis kinerja yang dapat dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan daerah. Analisis kinerja merupakan gambaran prestasi yang dapat dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Badan pendapatan daerah adalah salah satu badan yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Namun disisi lain pemerintah daerah sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Badan pendapatan daerah sebagai satuan kerja pendapatan daerah (SKPD) pemerintah provinsi sul-sel yang diberikan kewenangan untuk mengamban tugas dibidang pendapatan, sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai hak mengelola pendapatan daerah antara lain, memungut

pajak daerah retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah guna pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan, sering mengalami hambatan dalam mengelola pendapatan daerah, yaitu hilangnya beberapa jenis sumber pendapatan yang selama ini diterimah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. baik yang dikelolah langsung, maupun yang di terima dari pemerintah pusat sebagai dana hasil pajak, sebagai akibat pemberlakuan Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Masih terbatasnya pemanfaatan tekhnologi informasi dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah, sarana dan prasarana pelayanan pemungutan pendapatan daerah. Belum optimalnya pengelolaan aset milik daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Kontribusi BUMN khususnya perusahaan daerah Sulawesi selatan terhadap pemerintah daerah yang masih rendah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Pengelola keuangan daerah dalam hal kuantitas dan kualitasnya, Belum optimalnya sistem pengelolaan data base objek dan subjek pendapatan daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan program dan kegiatan strategi pada tahun 2011 untuk mengatasi masalah tersebut yang diantaranya adalah Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah No. 10 tahun 2010 tentang pajak daerah agar peraturan ini dapat berlaku efektif sejak tahun 2011, sehingga kehilangan

beberapa sumber pendapatan dapat di tutupi dari adanya kenaikan penerimaan pajak daerah. Menyusun naska akademik dan rencana peraturan daerah di sektor retribusi daerah sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengembangan dan peningkatan sistem layanan unggulan, antara lain berupa penambahan layanan Drive Thru, Gerai Samsat Sayang, Samsat Keliling, Online Samsat, DLL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah efektif digunakan dalam Menilai Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan ?
2. Apakah Rasio Efektifitas Efektif Digunakan dalam Menilai Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan ?
3. Apakah Rasio pertumbuhan Efektif Digunakan dalam Menilai Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah efektifitas penggunaan rasio kemandirian keuangan daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan
2. Untuk mengetahui apakah Rasio Efektifitas Efektif Digunakan dalam Menilai Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan

3. Untuk mengetahui apakah efektifitas penggunaan Rasio pertumbuhan Efektif Digunakan dalam Menilai Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik

Bagi bidang ilmu ekonomi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi jurusan akuntansi yang secara teoritis telah di pelajari dibangku perkuliahan. Dan bagi pembaca, menambah wawasan agar bisa mengetahui kinerja keuangan badan pendapatan daerah provinsi sulsei.

2. Manfaat praktik.

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan badan pendapatan daerah provinsi sulsei agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian kinerja keuangan

Menurut Wibowo (2014:7) kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja perusahaan merupakan seberapa efisien dan efektif sebuah perusahaan atau seberapa baik perusahaan itu mencapai tujuannya.

b. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber asli keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Menurut Sumarjo (2010:18), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, tetapi informasi tersebut memiliki fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.

2. Laporan keuangan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemda sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemberdayaan daerah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda.

B. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal dan pencapaian target Perda APBD, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan sebelum melakukan penyusunan ataupun analisis, perlu memperhatikan keterbatasan laporan keuangan. Setidaknya, setelah mengetahui keterbatasan-keterbatasan tersebut, kita menjadi lebih berhati-hati sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Apalagi analisis yang didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, keterbatasan laporan keuangan harus selalu diingat agar tidak terjadi

kesalahan dalam menyimpulkan hasil analisis. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah:

- 1) Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Masing-masing pengguna memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu, informasi yang disajikan harus dapat digunakan semua pihak.
- 2) Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai laporan mengenai kondisi segala waktu.
- 3) Analisis laporan keuangan tidak cukup hanya dengan melihat angka-angka, akan tetapi juga perlu mencermati aspek lain, seperti situasi ekonomi, budaya masyarakat, kondisi daerah dan lain-lain.
- 4) Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan.
- 5) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.

Neraca laporan realisasi anggaran dan laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan arus kas mempunyai hubungan yang sangat erat. Angka-angka yang ada di dalamnya saling berkaitan.

Informasi yang terbaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan dalam ketika pengguna melakukan analisis. Hubungan suatu perkiraan dengan perkiraan yang lain dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan suatu daerah serta menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan. Untuk itu, cermati hubungan antara suatu perkiraan dengan perkiraan

lain yang terdapat dalam laporan keuangan. Kita bahkan bisa mengaitkannya dengan fenomena ekonomi yang sedang berlangsung.

3. Menyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut di sampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam APBD statement No.4 dijelaskan beberapa prinsip atau sifat dan elemen dasar dari akuntansi (keuangan). Prinsip-prinsip ini mendasari setiap sifat dan ciri laporan keuangan dan output akuntansi lainnya . prinsip itu adalah sebagai berikut :

1. Entitas (*Accounting Entity*)

Fokus perhatian akuntansi adalah entitas atau lembaga tertentu yang akan di laporkan, bukan lembaga lainnya.

2. Pengukuran (*Measurement*)

Akuntansi merupakan media pengukuran sumber-sumber ekonomi (*Economic resources*) dan kewajiban (*liability*). Akuntansi harus mengukur hasil transaksidan ukuran yang dipakai adalah unit moneter.

3. Periode Waktu (*Time Period*)

Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Laporan harus memiliki batas waktu yang jelas.

4. Unit Moneter (*Monetary Unit*)

Pengukuran setiap transaksi dilakukan dalam bentuk nilai atau unit uang.

5. Accrual

Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta, kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadiannya, tanpa melihat transaksi atau penerimaan kas telah dilakukan atau belum.

6. Harga Pertukaran (*Exchange Price*)

Nilai dalam laporan keuangan didasarkan harga pertukaran ketika terjadi transaksi.

7. Penaksiran (*Aproximation*)

Dalam akuntansi, kita tak dapat menghindari masalah penaksiran, seperti taksiran umur, taksiran harga, pemilihan prinsip yang digunakandan sebagainya.

8. Pertimbangan (*Judgement*)

Dalam menyusun laporan keuangan diperlukan berbagai pertimbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan memilih alternatif prinsip maupun pemilihan cara penyajian laporan keuangan.

9. Bertujuan Umum (*General Purpose*)

Dalam laporan keuangan ditujukan untuk umum, bukan pengguna khusus.

10. Laporan Terkait (*Interrelated Statement*)

Neraca daftar laba/rugidan laporan sumber penggunaan kas mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait.

11. Substance Over Form

Akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada bukti legal atau formalnya.

12. Materialitas (*Materiality*)

Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting. Setiap pertimbangan dilakukan dengan tetap melihat signifikannya secara umum, Indikat materialitas terkait dampaknya terhadap laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diatur oleh hukum.

Dasar hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
- b. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- c. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan daerah
- d. Peraturan pemerintah No.104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan
- e. Peraturan pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

- f. Peraturan pemerintah No.106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- g. pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang tatacara pertanggungjawaban kepala daerah
- h. Peraturan pemerintah No.109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan daerah
- i. Peraturan pemerintah No.110 Tahun 2000 kedudukan keuangan DPRD
- j. Peraturan pemerintah No.11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah
- k. Keputusan menteri negeri No. 29 Tahun 2002 pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Laporan keuangan harus disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Perubahan akuntansi apapun harus tetap diungkapkan dalam laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sebaiknya mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Pemerintah dapat mempublikasikan hasil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

4. Rasio Keuangan

a. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan atau financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan.

Menurut Wahyudiono (2014:10) laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan.

Menurut Harahap (2015: 105) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang di pertanggungjawabkan oleh manajer atau pimpinan perusahaan yang menggambarkan kondisis keuangan suatu perusahaan dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan dari perusahaan tersebut.

b. Jenis rasio keuangan

Menurut Khalad (2011) menyatakan bahwa ada beberapa manfaat dari analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan mengatur standar ukuran kinerja, dapat digunakan untuk menilai masadepandan kredit/profitabilitas organisasi.

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga organisasi yang bersifat komersial. Adapun manfaat dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah

daerah adalah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan transfer}}$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

3. Rasio pertumbuhan

Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pendapatan daerah(PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

Diketahui t_1 = tahun awal

t_0 = tahun akhir

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektivitas, kemampuan daerah pun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Pemda).

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan sikap dan perilaku konsumen. Beberapa studi empiris maupun deskriptif yang menjadi acuan penulisan proposal ini antara lain:

Anggit Maharani (2013), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara *sampling sistematis*. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Paired Sample T Test*. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,247. Walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi kinerja keuangan dan pelayanan Universitas

Sebelas Maret Surakarta setelah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) cenderung meningkat dan lebih baik.

Mentari Yosephen Sijabat, (2014), meneliti pelaksanaan otonomi daerah, keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius. Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan penilaian kinerja serta kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan kota Malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Kinerja keuangan kota Malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecenderungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan kota Malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.

Isna Ardila (2015), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan pendekatan *value for money (VMM)*, yaitu dengan pengukuran 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas). Hasil penelitian menunjukkan untuk tingkat ekonomis selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 102.27%, tetapi peningkatan yang terjadi membuat rasio tidak memenuhi standar ekonomis *value for*

money. Tingkat efisiensi selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 107.69%, rasio berada di atas 100% sehingga untuk rasio efisiensi tidak memenuhi standar efisien *value for money*. Rasio efektivitas selama 4 tahun terakhir sudah memenuhi standar sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar efektivitas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tercapai lebih baik lagi.

Ni Ketut Erna Rahmawati (2016), meneliti kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012. Variable yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas penerimaan PAD, rasio efisiensi belanja daerah, rasio pertumbuhan, rasio proporsi, dan rasio ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat *proporsi* pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010 - 2012 tergolong ekonomis.

Sri Suranta (2017), meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan selatan kesimpulan dari hasil penelitian ini berisi model untuk menguji kualitas auditor, *leverage* dan

growth Terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KAP yang berafiliasi dengan *the big four* bukan merupakan jaminan terhadap berkurangnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun perusahaan menggunakan jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan *the big four*, tetapi tidak mampu untuk menekan terjadinya praktik manajemen laba. Dengan kata lain, penggunaan jasa KAP yang berafiliasi dengan *the big four* hanya sebagai upaya untuk mendapatkan citra positif dari pihak eksternal perusahaan. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan utang yang tinggi menyebabkan perusahaan dimonitor oleh pihak *debtholders* (pihak ketiga). Tindakan *monitoring* yang ketat oleh pihak ketiga terhadap perusahaan menyebabkan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan *debtholders* dan *shareholders*, sehingga *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. *Growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan memiliki kecenderungan untuk menaikkan laba dengan tujuan untuk menarik perhatian investor agar tetap menginvestasikan dananya pada perusahaan.

Muhamad Nuryanto (2013), Memperkuat tuntutan publik akan akuntabilitas baik di pusat maupun daerah tingkat pemerintah memiliki konsekuensi bagi pemerintah untuk menempatkan kebijakan di Indonesia tempat, yang relevan dengan pemenuhan tuntutan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kompetensi aparatur,

pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan di Indonesia unit kerja Pemprov DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah path analisis. Unit analisis adalah 23 unit kerja entitas akuntansi di kotapemerintah provinsi jakarta. Tahun penelitiannya adalah 2010. Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan ada pengaruh positif aparat kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan dengan koefisien jalur sebesar 0,656, yang berarti bahwa kualitas pelaporan keuangan 65,6% dijelaskan oleh aparat kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal. Sedangkan 34,4% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini. Secara parsial, kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang dominan terhadap kualitas laporan keuangan.

Carmine bianchi (2014), Tujuan dari artikel ini adalah untuk menunjukkan bagaimana dinamika sistem dapat digunakan untuk memperkaya manajemen kinerja di pemerintah daerah, dengan fokus secara khusus pada bagaimana pengembangan model dinamika sistem konseptual dan simulasi dapat mendorong pandangan bersama mengenai sistem yang relevan di antara para pemangku kepentingan untuk mengatasi faktor-faktor yang batasi penggunaan data Menanggapi hal ini, kami menyajikan sebuah studi kasus normatif tentang bagaimana penggerak utama dapat digunakan untuk mendorong pandangan bersama tentang sistem pengumpulan sampah perumahan untuk mendukung perubahan kebijakan dan proses. Temuan utama dari penelitian kami, bagaimanapun, adalah bahwa manajemen kinerja tidak dapat mengabaikan kekuatan hasil kewarganegaraan yang lebih luas yang berdampak pada masyarakat.

Sanusi fasilitat aramide (2015) Sistem pengendalian internal adalah proses dimana organisasi mengatur kegiatannya agar efektif dan efisien operasi, keandalan akuntabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mencoba menyelidiki pemahaman mendalam tentang sistem pengendalian internal yang efektif untuk akuntabilitas keuangan yang baik di tingkat local tingkat dewan pemerintah di Nigeria. Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah dewan pemerintahan daerah Oyo yang terpilih Negara, Nigeria. Data yang diperoleh dikodekan dan dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase, lebih baik, non parametric uji statistik, Chi-kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis yang diformulasikan dengan menggunakan paket analisis data STATA 10. Hasil dari Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sangat penting untuk akuntabilitas keuangan yang baik di tingkat local dewan daerah pemerintah di Nigeria. Karena itu, studi tersebut merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan peningkatan upaya untuk memastikan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif diterapkan di dalam pemerintah daerah untuk ditingkatkan akuntabilitas keuangan mereka.

Jackson Mnago Ndungo (2016), Tujuan: Penelitian ini mengetahui pengaruh fungsi perlindungan konsumen terhadap kinerja keuangan SACCO di Kenya. Metodologi: Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Populasi target terdiri dari 181 SACCO yang mengambil set pertama pada tanggal 31 Desember 2014 dan tiga CRB berlisensi di Kenya. Sampel acak yang digunakan dalam penelitian ini, dimana SACCOs dikelompokkan menjadi lima strata masing-masing yang kemudian dipilih

secara acak. SACCOs dikelompokkan menjadi lima strata berbasis pemerintah, berbasis guru, berbasis petani, berbasis lembaga swasta dan berbasis masyarakat. Studi ini mengambil sampel 135 dari 181 (74,5%) deposit berlisensi yang menggunakan SACCOs karena ini adalah satu-satunya SACCO yang mengambil lisensi berlisensi pada tahun 2014. Pilihan deposit berlisensi yang mengambil SACCO di Kenya sangat obyektif karena memungkinkan memperoleh informasi yang perwakilan dari Kenya. Selain itu, SACCOs membentuk lengan yang lebih kecil di sektor keuangan dan dalam kebanyakan kasus menangani kelompok klien yang lebih besar dari sektor informal dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank. Data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, dan statistik yang dihasilkan mencakup statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif tertentu yang digunakan meliputi frekuensi dan persentase sedangkan statistik inferensial tertentu termasuk analisis korelasi Pearson dan regresi. Analisis korelasi digunakan untuk menjalin hubungan antara fungsi perlindungan konsumen dan kinerja keuangan. Analisis regresi digunakan untuk menetapkan signifikansi variabel dan tingkat efek kausal variabel bebas terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi sederhana. Temuan: Dari hasil analisis data, disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara fungsi proteksi konsumen dan kinerja keuangan sehingga keberadaan biro referensi kredit sesuai untuk meningkatkan kinerja keuangan SACCOs. Ini berarti bahwa biro referensi kredit telah menyebabkan perlindungan konsumen dan meningkatkan hak pelanggan. Demikian pula, biro referensi kredit telah menyebabkan asumsi

bahwa pinjaman adalah hak tanpa memandang kemampuannya. Biro referensi kredit telah mengurangi tindakan monopoli yang tidak diinginkan dari kreditur. Terakhir, biro referensi kredit telah menyebabkan berkurangnya "budaya" buruk pada pembayaran pinjaman.

Ahwan Hadi (2017), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan kinerja akuntabilitas terhadap keterbukaan informasi berdasarkan WEB-ICT dan bagaimana implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai respon terhadap persyaratan keterbukaan informasi publik. Menggunakan 307 kabupaten dan kota pemerintah daerah di Indonesia sebagai sampel berdasarkan purposive sampling dan dianalisis dengan teknik SEM-PLS. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap keterbukaan informasi berbasis web-ICT. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat pertanggungjawaban kinerja yang lebih baik dan memiliki karakteristik yang lebih besar atau lebih matang akan mengungkapkan informasi keuangan yang lebih luas melalui situs web. Temuan ini konsisten dengan teori signaling yang menyatakan bahwa organisasi cenderung memberikan sinyal dalam bentuk keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan untuk menggambarkan kondisi positif. Studi ini juga menemukan bahwa pengungkapan keuangan berbasis web-ICT memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karakteristik sektor publik yang nonprofitoriented menyebabkan pengungkapan informasi keuangan tidak mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah. Tidak seperti sektor swasta, pengungkapan informasi mendorong kinerja keuangan perusahaan

yang lebih baik. Kata kunci: Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan, Keterbukaan Informasi Berbasis Web-ICT;

Dari uraian diatas maka dapat dibuat tabel penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Judul	Jenis-Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maharani. A et.al(2013)	Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum	Deskriptif kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah di terapkannya pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di universitas sebelah maret Surakarta.
2	Sijabat. M.Y et.al (2014)	Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah	Metode deskriptif pendekatan kualitatif	Dari hasil penelitian dapat dikatan baik karena setiap tahun dapat mengoptimalkan kemampuan keuangannya meskipun hasil presentasinya masih berada dalam kategori kurang mampu.
3	Ardila. I et.al (2015)	Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan <i>value for money</i> pada pengadilan negeri tebing tinggi	Pengukuran 3 E (ekonomis, efesiensi, efektivitas)	Penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pengadilan negeri tebing tinggi dengan pendekatan <i>value for money</i>
4	rahmawati. E et.al (2016)	Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012	Metode data kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali
5	Suranta.S et.al (2017)	Analisis kinerja keuangan \ pemerintah daerah provinsi jawa tengah dan Kalimantan selatan	Analisis statistic deskriptif	Penelitian ini berisi model Untuk menguji pengaruh Kualitas auditor, leverage, Dan growth terhadap Manajemen laba.

6	Muhamad Nuryanto et.al(2013)	The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia)	Metode yang digunakan adalah path analisis.	Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan ada pengaruh positif aparat kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan
7	Carmine Bianchi et.al (2014)	Performance Management in Local Government: The Application of System Dynamics to Promote Data Use	model dinamika sistem konseptual dan simulasi	Temuan utama dari penelitian kami, bagaimanapun, adalah bahwa manajemen kinerja tidak dapat mengabaikan kekuatan hasil kewarganegaraan yang lebih luas yang berdampak pada masyarakat.
8	Muhammed Bashiret.al (2015)	The Effectiveness Of Internal Control System And Financial Accountability At Local Government Level In Nigeria Sanusi Fasilat Aramide1 & Mustapha Muhammed Bashir2	analisis data Stata 10.	Hasil dari Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sangat penting untuk akuntabilitas keuangan yang baik di tingkat local dewan daerah pemerintah di Nigeria.
9	Jackson Mnago Ndungo et.al (2016)	Effect Of Consumer Protection Function On Financial Performance Of Saccos In Kenya	rancangan penelitian deskriptif.	Temuan: Dari hasil analisis data, disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara fungsi proteksi konsumen dan kinerja keuangan sehingga keberadaan biro referensi kredit sesuai untuk meningkatkan kinerja keuangan SACCOS.

10	Ahwan Hadi et.al(2017)	Financial disclosure based on web –ICT determinants : Its implication for local government financial performance in Indonesia	dianalisis dengan teknik SEM-PLS.	Temuan ini konsisten dengan teori signaling yang menyatakan bahwa organisasi cenderung memberikan sinyal dalam bentuk keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan untuk menggambarkan kondisi positif.
----	-------------------------	---	-----------------------------------	--

Sumber : jurnal, 2018

Hasil analisis dari sepuluh temuan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah di terapkannya pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di universitas sebelah maret Surakarta. Dari hasil penelitian dapat dikatan baik karena setiap tahun dapat mengoptimalkan kemampuan keuangannya meskipun hasil presentasinya masih berada dalam kategori kurang mampu. Penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pengadilan negeri tebing tinggi dengan pendekatan *value for money* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali. Penelitian ini berisi model Untuk menguji pengaruh Kualitas auditor, leverage, Dan growth terhadap Manajemen laba Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan ada pengaruh positif aparat kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan Temuan utama dari penelitian kami, bagaimanapun, adalah bahwa manajemen kinerja tidak dapat mengabaikan kekuatan hasil kewarganegaraan yang lebih luas yang berdampak pada masyarakat. Hasil dari Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sangat penting untuk akuntabilitas keuangan yang baik di tingkat local dewan daerah pemerintah di Nigeria. Temuan: Dari hasil analisis

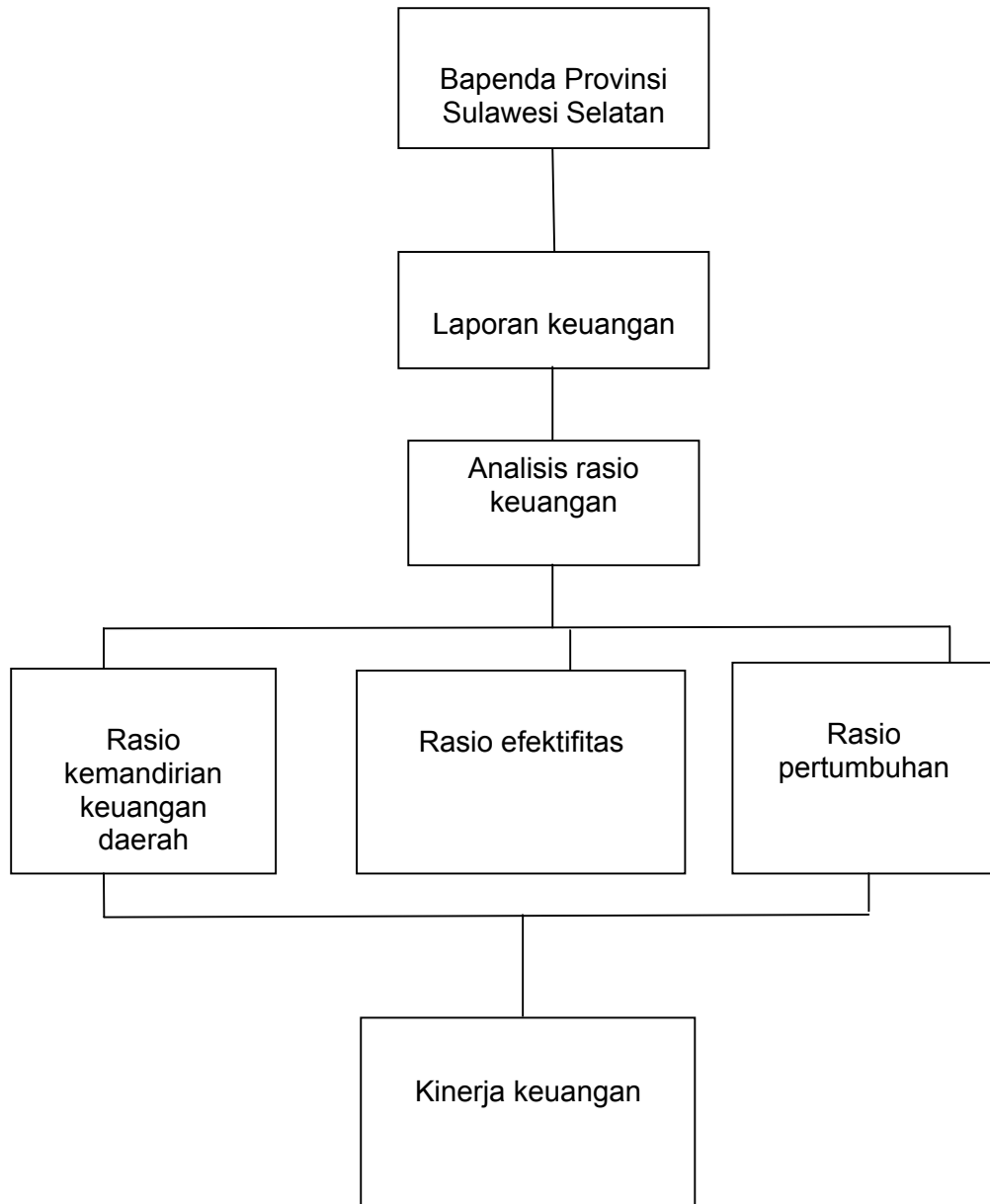
data, disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara fungsi proteksi konsumen dan kinerja keuangan sehingga keberadaan biro referensi kredit sesuai untuk meningkatkan kinerja keuangan SACCOs. Temuan ini konsisten dengan teori signaling yang menyatakan bahwa organisasi cenderung memberikan sinyal dalam bentuk keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan untuk menggambarkan kondisi positif. Adapun keterbaruan kajian yang saya teliti yaitu analisis data yang digunakan rasio anggaran, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektifitas.

C. Kerangka Pikir

Instansi badan Pendapatan Daerah merupakan sumber-sumber pendapatan daerah seperti Dinas perpajakan, Dinas pasar dan sub Dinas pelelangan ikan dan semua sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja badan Pendapatan Daerah. Maka Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada dasarnya merupakan kinerja keuangan yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan.

Analisis kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

penulis menyimpulkan kerangka teorinya yaitu Untuk mengukur kinerja keuangan analisis kinerja yang digunakan adalah analisis rasio perhitungan anggaran, rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, guna untuk mencapai kinerja keuangan yang efektif. Bagan yang digunakan adalah



Gambar 2.1

KERANGKA PIKIR

D. Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan di teliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.

Analisis rasio keuangan

1. Rasio kemandirian keuangan daerah dengan kinerja keuangan

Pada *agency theory* dimana perusahaan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis. Di organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan ini telah dipraktikan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. Pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sibuk dengan salah satu kegiatan utamanya yaitu menyusun anggaran APBD 2008.

beberapa penelitian terdahulu menggunakan teori agensi(*agency theory*) sebagai teori utama dalam penelitian terkait pengungkapan di internet oleh pemerintah daerah.

Hubungan antara pemerintah dan warga telah dianggap di bawah teori *principal agent* (keagenan) yang telah digunakan luas dalam administrasi public untuk memeriksa masalah yang terkait dengan manajemen dan administrasi di negara yang berlandaskan prinsip desentralisasi (medina 2012).

Rahmah (2017), analisis kinerja anggaran pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bireun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semakin besar tingkat penyerapan anggaran semakin optimal kinerja anggaran, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan anggaran semakin rendah pula kinerja anggaran pada SKPK Kabupaten Bireuen. Persentase serapan anggaran SKPK paling tinggi selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 adalah sekretariat MPU dengan rata-rata 99,50%, Badan pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga (86,66%) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (86,46%) dan Dinas Pengairan, Pertambangan dan energi (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (80,47%).

Dari uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada kinerja keuangan dan hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2. Rasio efektivitas dengan kinerja keuangan

Pengungkapan laporan keuangan dan kinerja oleh pemerintah daerah melalui internet dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi biaya agensi.

Susilowati (2016), analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten karanganyar tahun anggaran 2013-2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Karanganyar sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100% yaitu

99,91%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh pada kinerja keuangan. Dan hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Rasio efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan

3. Rasio pertumbuhan dengan kinerja keuangan

Teori *principal-agent* yang utamanya di kenal sebagai teori keagenan memberikan wawasan kedalam hubungan akuntabilitas dari sudut pandang ekonomi serta wawasan alasan dibalik pelaporan keuangan dan non keuangan secara suka rela oleh pemerintah daerah.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Mentari Yosephen Sijabat, (2014), meneliti pelaksanaan otonomi daerah, keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius. Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan penilaian kinerja serta kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan kota Malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Kinerja keuangan kota Malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecenderungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan kota Malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.

H3: Rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

BAB III

ME TODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi selatan yang berlokasi di Jl. AP. Pettarani No.1 kota Makassar. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan berlangsung selama satu bulan, mulai 25 agustus sampai 25 september 2018

C. Definisi Operasional

1. Badan Pendapatan Daerah adalah salah satu badan yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kewenangan mengamban tugas di bidang Pendapatan, sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai hak mengelola Pendapatan Daerah, antara lain memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya yang berada di Daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah guna pembiayaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3. kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja perusahaan merupakan seberapa efisien dan efektif sebuah perusahaan atau seberapa baik perusahaan itu mencapai tujuannya.
4. Analisis Kinerja adalah proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan suatu perusahaan yang menyangkut dengan review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan member solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu pada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Makassar.
5. Analisis kinerja keuangan adalah gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Makassar.

D. Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapat informasi mengenai data yang relevan dengan asumsi penulisan proposal penelitian agar dapat lebih baik, maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian lapangan

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Pada penelitian lapangan ini penulis menggunakan dua teknik penelitian yaitu :

- a. Teknik observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian
- b. Teknik interview yaitu dilakukan dengan wawancara langsung dengan sumber teknik yaitu pimpinan dan karyawan

2. Penelitian pustaka

Yaitu dengan mempelajari beberapa literature yang ada hubungannya dengan penulisan proposal, ini dilengkapi data yang di peroleh di lapangan serta untuk mendapatkan suatu kerangka teori yang akan di pakai sebagai bahan acuan.

E. Populasi Dan Sampel

Bagian ini menjelaskan wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. adapun populasi yang akan diambil di sini adalah pendapatan asli daerah badan pendapatan daerah. Dan sampel yang diambil yaitu pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2013-2017.

F. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis kinerja keuangan maka digunakan:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan transfer}}$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

3. Rasio pertumbuhan

Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pendapatan daerah(PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

Diketahui t_1 = tahun awal

t_0 = tahun akhir

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan pendapatan daerah merupakan salah satu dinas yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Badan pendapatan daerah sebagai satuan kerja daerah (SKPD) pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kewenangan mengamban tugas di bidang pendapatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai hak mengelola pendapatan daerah, antara lain memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah guna pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sekitar tahun 1972 dibawah dinas pendapatan daerah merupakan salah satu bagian pada biro keuangan setwilda provinsi Sulawesi Selatan dengan nama bagian penghasilan daerah.

Perkembangan selanjutnya dengan luasnya daerah kerja urusan yang menyangkut pendapatan daerah baik meliputi pendapatan asli daerah sendiri

(pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya yang sah maupun pendapatan Negara yang diserahkan ke daerah provinsi) dan setiap SKPD mendapatkan tugas khusus dari secretariat pemerintah provinsi Sulawesi selatan.

Bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur/pemerintah provinsi Sulawesi selatan Nomor : 130/IV/1973 tanggal 17 april 1973 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan.

Badan pendapatan daerah provinsi dati 1 sulawesi selatan sebagai aparat pemupuk pendapatan daerah provinsi dati 1 sulawesi selatan perlu ditingkat kembangkan pengelolaannya baik pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah sehingga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud ditetapkanlah susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah provinsi Sulawesi selatan nomor 6 tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan.

Pada tahun 2016 dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan berganti nama menjadi badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengamahkan peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang pada akhirnya ditindak lanjuti dengan peraturan gubernur Sulawesi selatan nomor 99 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas

dan fungsi, serta tata kerja badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan.

2. Visi dan Misi

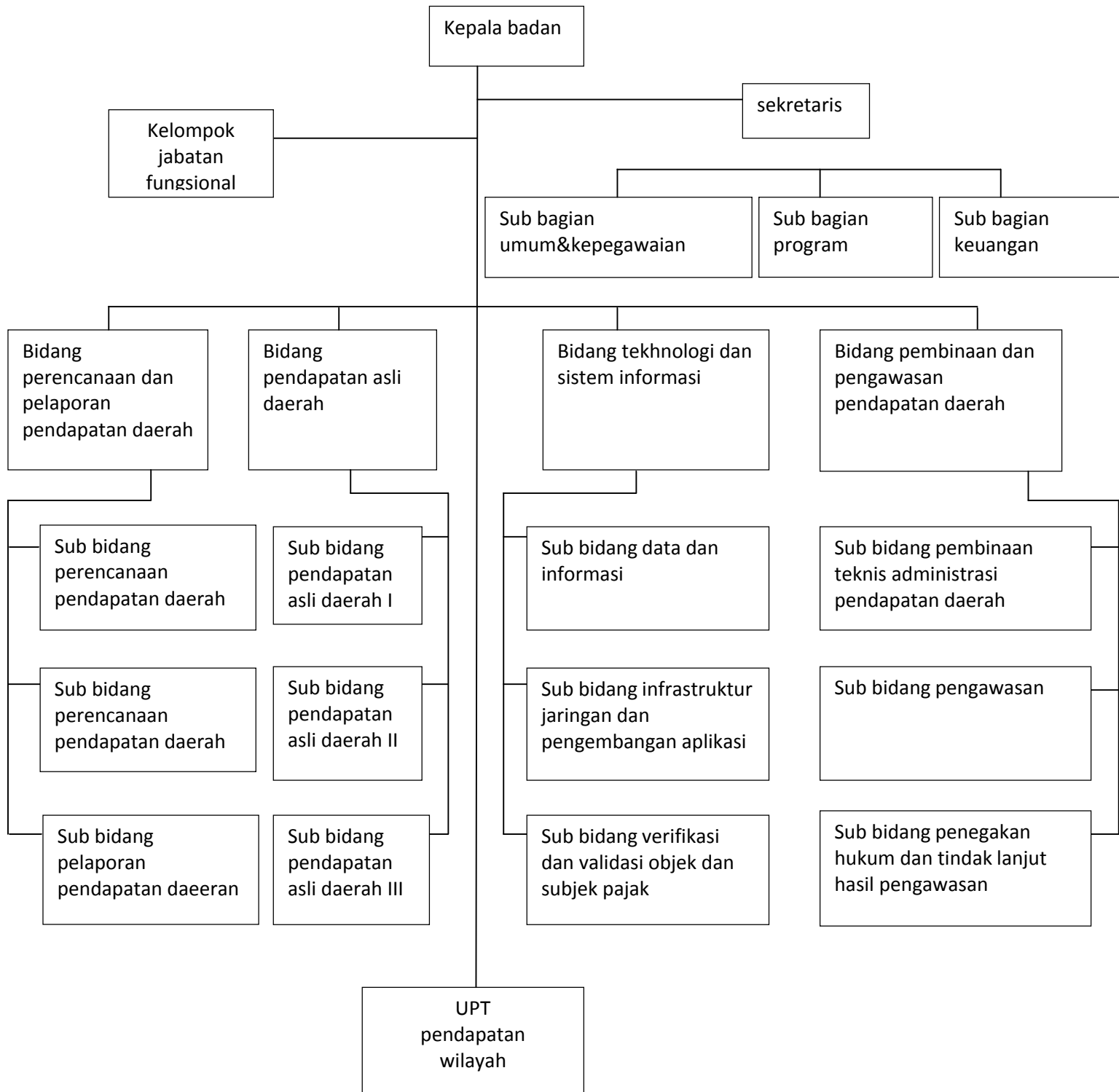
a. Visi

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang maksimal melalui sistem pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, dan inovatif.

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% pertahun
2. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal,jujur, bertanggung jawab dan professional dalam mengelolah pendapatan daerah. Dan
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

3. Struktur organisasi badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan



Gambar 3.1
Struktur Bapenda

a. Kepala badan pendapatan daerah

Kepala badan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan badan. Sub bagian didalam sekretaris :

1. Sub bagian program

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.

2. Sub bagian umum dan kepegawaian

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

3. Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

c. Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah.

Sub bidang peraturan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang peraturan pendapatan daerah.

d. Bidang pendapatan asli daerah

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan bidang pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.

Sub bidang pendapatan asli daerah :

1. Sub bidang pendapatan asli daerah I

Tugasnya membantu kepala bidang pendapatan asli daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan bidang pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah I meliputi : pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Sub bidang pendapatan asli daerah II

Tugasnya membantu kepala bidang pendapatan asli daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan bidang pendapatan bidang pendapatan asli daerah II meliputi : pajak air permukaan, bahan bakar kendaraan, dan pajak rokok.

3. Sub bidang pendapatan asli daerah III

Tugasnya membantu kepala bidang pendapatan asli daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan bidang pendapatan bidang pendapatan asli daerah III meliputi : koordinasi dan pengelolaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

e. Bidang teknologi dan sistem informasi

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak. Sub bidang teknologi dan sistem informasi :

1. Sub bidang data dan informasi

Tugasnya adalah membantu kepala bidang teknologi dan informasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan bidang pendapatan daerah bidang data dan informasi.

2. Sub bidang infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi

Tugasnya adalah membantu kepala bidang teknologi dan informasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan bidang pendapatan daerah bidang infrastruktur, jaringan dan pengembangan aplikasi.

3. Sub bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak

Tugasnya adalah membantu kepala bidang teknologi dan informasi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan bidang pendapatan daerah bidang verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

f. Bidang pembinaan dan pengawasan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan. Sub bagian dan seksi di dalam struktur organisasi UPT pendapatan wilayah meliputi :

1. Sub bagian tata usaha

Mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

2. Seksi pelayanan dan penetapan

Mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengoordinasikan menyiapkan bahan melakukan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan pajak daerah serta pendapat atan.

3. Seksi pendapatan dan penagihan

Mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis pendapatan dan penagihan pajak daerah.

B. Penyajian Data

1. Hasil Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang berupa data dalam bentuk angka-angka. Dan sumber data yang digunakan Data sekunder, yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari dalam perusahaan atau yang dikeluarkan oleh pihak internal yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti yakni laporan keuangan.

Berikut adalah hasil penelitian dari masing-masing rasio keuangan badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan:

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berikut adalah realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun anggaran 2013 sampai 2017 dilihat dari tabel pajak daerah dan retribusi daerah. Dibawah ini :

Tabel 3.1
Gambaran pemungutan pajak badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan tahun 2013-2017

Tahun	Pajak kendaraan bermotor (anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase kenaikan pertahun	kriteria
2013	714.433.892.000,00	722.728.730.273,00	101,16	Sangat efektif
2014	808.194.220.000,00	813.245.129.812,00	100,62	Efektif
2015	904.284.250,000,00	907.589.844.229,00	100,37	Efektif
2016	1.006.097.880.000,00	1.026.994.107.476,00	102,08	Sangat efektif
2017	1.106.098.000.000,00	871.083.153.435,00	78,75	Kurang efektif
Jumlah	5.002.162.029.874,00	5.050.873.542.167,00		

Sumber data :Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 3.1 diketahui tahun 2013 anggaran pajak kendaraan bermotor 714.433.892.000,00 dan realisasi 722.728.730.273,00. Tahun 2014 anggaran pajak kendaraan bermotor 808.194.220.000,00 dan realisasi 813.245.129.812,00. Tahun 2015 anggaran pajak kendaraan bermotor 904.284.250,000,00 dan realisasi 907.589.844.229,00 tahun 2016 anggaran pajak kendaraan bermotor 1.006.097.880.000,00 dan realisasi 1.026.994.107.476,00 tahun 2017 anggaran pajak kendaraan bermotor 1.106.098.000.000,00 dan realisasi 871.083.153.435,00. Dari angka-angka realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2017 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 3.2
Gambaran pemungutan pajak badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan tahun 2013-2017

Tahun	Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) (anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase kenaikan pertahun	Kriteria
2013	1.128.938.000.000,00	1.038.135.410.365,00	91,96	Efektif
2014	1.151.971.000.000,00	1.016.618.442.123,00	87,49	Efektif
2015	1.105.290.000.000,00	963.103.182.949,00	87,14	Efektif
2016	991.412.000.000,00	992.000.322.043,00	100,06	Sangat efektif
2017	987.912.000.000,00	740.922.560.543,00	75,00	Kurang efektif
Jumlah	6.732.056.000.000,00	6.323.132.251.223,00		

Sumber data :Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 3.2 diketahui bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2013 anggaran 1.128.938.000.000,00 dan realisasi 1.038.135.410.365,00 tahun 2014 anggaran bea balik nama kendaraan bermotor 1.151.971.000.000,00 dan realisasi 1.016.618.442.123,00 tahun 2015 anggaran 1.105.290.000.000,00 dan realisasi 1.016.618.442.123,00 tahun 2016 anggaran bea balik nama kendaraan bermotor 991.412.000.000,00 dan realisasi 992.000.322.043,00 tahun 2017 anggaran bea balik nama kendaraan bermotor 987.912.000.000,00 dan realisasi 740.922.560.543,00. Dari angka-angka realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2017 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 3.3
Gambaran pemungutan pajak badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan tahun 2013-2017

Tahun	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase kenaikan pertahun	Kriteria
2013	401.468.142.959,00	406.243.063.444,00	101,19	Sangat efektif
2014	475.451.561.606,00	487.005.464.276,00	102,43	Sangat efektif
2015	542.857.901.500,00	535.328.784.366,00	98,61	efektif
2016	495.902.762.000,00	501.074.595.663,00	101,04	Sangat efektif
2017	546.050.000.000,00	461.094.305.222,00	84,44	Cukup efektif
Jumlah	2.842.043.845.199,00	2.807.364.863.762,00		

Sumber data :Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 3.3 diketahui tahun 2013 anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor 401.468.142.959,00 dan realisasi 406.243.063.444,00 tahun 2014 anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor 475.451.561.606,00 dan realisasi 487.005.464.276,00 tahun 2015 anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor 542.857.901.500,00 dan realisasi 535.328.784.366,00 tahun 2016 anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor 495.902.762.000,00 dan realisasi 501.074.595.663,00 tahun 2017 anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor 546.050.000.000,00 dan realisasi 461.094.305.222,00. Dari angka-angka realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2017 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 3.4
Gambaran pemungutan pajak badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan tahun 2013-2017

Tahun	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase kenaikan pertahun	Kriteria
2013	91.676.436.213,00	86.320.729.586,00	94,16	efektif
2014	91.856.851.500,00	105.740.935.817,00	115,11	Sangat efektif
2015	105.080.500.000,00	99.183.069.526,00	94,39	Efektif
2016	72.022.500.000,00	74.813.180.695,00	103,87	Sangat efektif
2017	79.425.000.000,00	82.792.646.556,00	104,24	Sangat efektif
Jumlah	606.232974.644,00	607.541.106.311,00		

Sumber data :Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 3.4 diketahui tahun 2013 anggaran pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan 91.676.436.213,00 dan realisasi 86.320.729.586,00 tahun 2014 anggaran 91.856.851.500,00 dan realisasi 105.740.935.817,00 tahun 2015 anggaran pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan 105.080.500.000,00 dan realisasi 99.183.069.526,00 tahun 2016 anggaran pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan dan realisasi 74.813.180.695,00 tahun 2017 anggaran pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan dan realisasi 82.792.646.556,00. Dari angka-angka realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2017 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 3.5
Gambaran pemungutan pajak badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan tahun 2013-2017

Tahun	Pajak rokok (anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentas e kenaikan pertahun	Kriteria
2013				
2014	270.000.000.000,00	244.656.580.698,00	90,61	Efektif
2015	410.000.000.000,00	397.040.724.601,00	96,84	Efektif
2016	580.000.000.000,00	484.780.158.500,00	83,58	Cukup efektif
2017	600.000.000.000,00	445.152.124.121,00	74,19	Kurang efektif
Jumlah	1.260.000.000.000,00	1.126.477.463.799,00		

Sumber data :Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 3.5 diketahui tahun 2013 anggaran pajak rokok anggaran dan realisasinya tidak dicantumkan tahun 2014 anggaran pajak rokok 270.000.000.000,00 dan realisasi 244.656.580.698,00 tahun 2015 anggaran pajak rokok 410.000.000.000,00 dan realisasi 397.040.724.601,00 tahun 2016 anggaran pajak rokok 580.000.000.000,00 dan realisasi 484.780.158.500,00 tahun 2017 anggaran pajak rokok 600.000.000.000,00 dan realisasi 445.152.124.121,00. Dari angka-angka realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2017 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 3.6
Gambaran retribusi daerah badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan tahun 2013-2017

Tahun	Retribusi jasa umum (anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase kenaikan pertahun	Kriteria
2013	50.454.200.000,00	42.078.628.348,63	83,40	Cukup efektif
2014	62.018.300.000,00	76.531.469.537,38	112,22	Sangat efektif
2015	70.093.420.000,00	75.090.572.261,00	107,13	Sangat efektif
2016	63.835.120.000,00	66.971.281.422,00	104,91	Sangat efektif
2017	66.387.320.000,00	47.684.393.268,00	71,83	Kurang efektif
Jumlah	312.788.360.000,00	308.356.344.837,01		

Sumber data :retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 3.6 diketahui tahun 2013 anggaran retribusi jasa umum 50.454.200.000,00 dan realisasi 42.078.628.348,63 tahun 2014 anggaran retribusi jasa umum 62.018.300.000,00 dan realisasi 76.531.469.537,38 tahun 2015 anggaran retribusi jasa umum 70.093.420.000,00 dan realisasi 75.090.572.261,00 tahun 2016 anggaran retribusi jasa umum 63.835.120.000,00 dan realisasi 66.971.281.422,00 tahun 2017 anggaran retribusi jasa umum 66.387.320.000,00 dan realisasi 47.684.393.268,00. Dari angka-angka realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2017 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 3.7
Gambaran retribusi daerah badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan tahun 2013-2017

Tahun	Retribusi jasa usaha (anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentas e kenaikan pertahun	Kriteria
2013	18.414.026.700	17.524.628.307	95.17	Efektif
2014	22.075.600.200	18.316.263.148	82.97	Cukup efektif
2015	20.727.997.700	17.178.068.930	82.87	Cukup efektif
2016	20.603.556.800	18.091.704.988	87.81	Cukup efektif
2017	22.707.061.697	13.974.161.695	61.54	Kurang efektif
Jumlah	104.528.243.097	85.084.827.068		

Sumber data :retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 3.7 diketahui tahun 2013 anggaran retribusi jasa usaha 18.414.026.700 dan realisasi 17.524.628.307 tahun 2014 anggaran retribusi jasa usaha 22.075.600.200 dan realisasi 18.316.263.148 tahun 2015 anggaran retribusi jasa usaha 20.727.997.700 dan realisasi 17.178.068.930 tahun 2016 anggaran retribusi jasa usaha 20.603.556.800 dan realisasi 18.091.704.988 tahun 2017 anggaran retribusi jasa usaha 22.707.061.697 dan realisasi 13.974.161.695. Dari angka-angka realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2017 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Tabel 3.8
Gambaran retribusi daerah badan pendapatan daerah provinsi
Sulawesi selatan tahun 2013-2017

Tahun	Retribusi perizinan tertentu (anggaran) (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase kenaikan pertahun	Kriteria
2013	915.000.000	925.413.670	101.14	Sangat efektif
2014	1.550.000.000	886.288.200	57.18	Tidak efektif
2015	950.000.000	907.604.100	95.54	Efektif
2016	1.100.000.000	1.469.586.600	133.60	Sangat efektif
2017	2.198.000.000	2.005.505.000	91.24	Efektif
Jumlah	6.194.397.570	6.713.000.000		

Sumber data :retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 3.8 diketahui tahun 2013 anggaran retribusi perizinan tertentu 915.000.000 dan realisasi 925.413.670 tahun 2014 anggaran retribusi perizinan tertentu 1.550.000.000 dan realisasi 886.288.200 tahun 2015 anggaran retribusi perizinan tertentu 950.000.000 dan realisasi 907.604.100 tahun 2016 anggaran retribusi perizinan tertentu 1.100.000.000 dan realisasi 1.469.586.600 tahun 2017 anggaran retribusi perizinan tertentu 2.198.000.000 dan realisasi 2.005.505.000. Dari angka-angka realisasi APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013-2017 dapat diketahui analisis kinerja keuangannya secara detail, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.

Berikut perhitungan APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.

rumus yang digunakan adalah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan transfe}}$$

Tabel 3.9
Kriteria kinerja keuangan rasio kemandirian keuangan daerah

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat efektif
90% -100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60 %	Tidak efektif

Sumber : depdagri, kepmendagri, tahun 2018

$$\text{RKKD tahun anggaran 2013} = \frac{2.560.045.632.511,80}{1.422.165.818.457.00} = 180\%$$

$$\text{RKKD tahun anggaran 2014} = \frac{3.029.122.238.490,00}{1.531.386.240.824.00} = 197\%$$

$$\text{RKKD tahun anggaran 2015} = \frac{3.174.524.153.152,94}{1.590.754.389.411.00} = 199\%$$

$$\text{RKKD tahun anggaran 2016} = \frac{3.449.561.308.104,52}{3.704.816.673.661.00} = 93\%$$

$$\text{RKKD tahun anggaran 2017} = \frac{2.967.106.194.532,23}{4.721.375.711.240.00} = 62\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun anggaran 2013 sebesar 180%, berdasarkan kriteria pengukuran badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 maka rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2013 berada dikategori sangat

efektif, berbeda dengan tahun anggaran 2014 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan tapi masih di kategorikan sangat efektif karena persentasinya 197%, begitupun dengan tahun anggaran 2015 persentasenya mengalami kenaikan 199% sedangkan tahun anggaran 2016 persentasenya mengalami penurunan 93% dan dikategorikan efektif dan tahun anggaran 2017 mengalami penurunan 62% dikategorikan kurang efektif.

b. Rasio efektifitas

Rasio efektivitas Rasio Efektivitas adalah rasio yang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penda patan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Berikut perhitungan APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dengan menggunakan rasio efektivitas rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

Tabel 3.10
kriteria kinerja keuangan rasio efektifitas

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat efektif
90% -100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60 %	Tidak efektif

Sumber : depdagri, kepmendagri, tahun 2018

$$\text{Rasio efektifitas tahun anggaran 2013} = \frac{2.560.045.632.511,80}{2.477.808.162.495,00} = 104\%$$

$$\text{Rasio efektifitas tahun anggaran 2014} = \frac{3.029.122.238.490,00}{3.128.864.413.870,00} = 96\%$$

$$\text{Rasio efektifitas tahun anggaran 2015} = \frac{3.174.524.153.152,94}{3.438.698.249.296,00} = 92\%$$

$$\text{Rasio efektifitas tahun anggaran 2016} = \frac{3.449.561.308.104,52}{3.512.797.239.983,00} = 98\%$$

$$\text{Rasio efektifitas tahun anggaran 2017} = \frac{2.967.106.194.532,23}{3.743.344.520.531,00} = 79\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio efektifitas badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun anggaran 2013 sebesar 104%, berdasarkan kriteria pengukuran badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 maka rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2013 berada dikategori sangat efektif, berbeda dengan tahun anggaran 2014 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan dikategorikan efektif karena persentasi anggarannya 96%, begitupun dengan tahun anggaran 2015 persentasenya mengalami penurunan 92% sedangkan tahun anggaran 2016 persentasenya mengalami kenaikan 98% dan dik ateorikan efektif dan tahun anggaran 2017 mengalami penurunan 79% dikategorikan kurang efektif.

c. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Berikut perhitungan APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dengan menggunakan rasio efektifitas rumus yang digunakan adalah :

$$\text{rasio pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

Diketahui t1 = tahun awal

t0 = tahun akhir

tabel 3.11
kriteria kinerja keuangan rasio pertumbuhan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat efektif
90% -100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60 %	Tidak efektif

Sumber : depdagri, kepmendagri, tahun 2018

$$\text{Rasio pertumbuhan 2013} = \frac{2.967.106.194.532,23 - 2.560.045.632.511,80}{2.560.045.632.511,80} = 137\%$$

$$\text{Rasio pertumbuhan 2014} = \frac{3.029.122.238.490,00 - 2.967.194.532,23}{2.967.194.532,23} = 97\%$$

$$\text{Rasio pertumbuhan 2015} = \frac{3.174.524.153.152,94 - 2.560.045.632.511,80}{2.560.045.632.511,80} = 93\%$$

$$\text{Rasio pertumbuhan 2016} = \frac{3.449.561.308.104,52 - 2.560.045.632.511,80}{2.560.045.632.511,80} = 135\%$$

$$\text{Rasio pertumbuhan 2017} = \frac{2.967.106.194.532,23 - 2.560.045.632.511,80}{2.560.045.632.511,80} = 62\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun anggaran 2013 sebesar 137%, berdasarkan kriteria pengukuran badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 maka rasio pertumbuhan tahun anggaran 2013 berada dikategori sangat efektif, berbeda dengan tahun anggaran 2014 rasio pertumbuhan mengalami penurunan menjadi 97% di kategorikan efektif begitupun dengan tahun anggaran 2015 persentasenya mengalami penurunan 93% sedangkan tahun anggaran 2016 persentasenya

mengalami kenaikan lagi 135% dan dikategorikan sangat efektif dan tahun anggaran 2017 mengalami penurunan 62% dikategorikan kurang efektif.

Berikut adalah rekapitulasi rasio keuangan badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun anggaran 2013-2017 :

**Rekapitulasi Rasio Keuangan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2013-2017
Tabel 3.12**

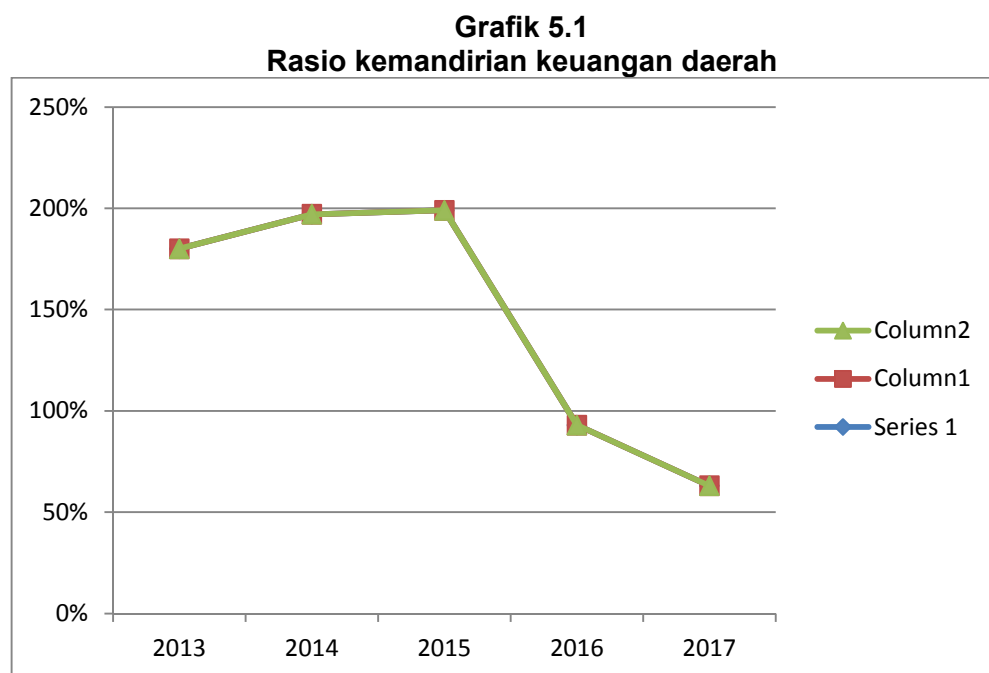
Tahun	Rasio kemandirian		Rasio efektifitas		Rasio pertumbuhan	
	Persen %	Kriteria	Persen%	Kriteria	Persen%	Kriteria
2013	180%	Sangat efektif	104%	Sangat efektif	137%	Sangat efektif
2014	197%	Sangat efektif	96%	Efektif	97%	Efektif
2015	199%	Sangat efektif	92%	Efektif	93%	Efektif
2016	93%	Efektif	98%	Efektif	135%	Sangat efektif
2017	62%	Kurang efektif	79%	Kurang efektif	62%	Kurang efektif

2. Pembahasan

Dari hasil rekapitulasi rasio diatas dapat diketahui rasio keuangan badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan sebagai berikut:

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio maka diperoleh data sebagai berikut pada tahun 2013 rasio kemandirian keuangan daerah berada pada posisi atau hasil persentasenya sebesar 180%, tahun 2014 197%, tahun 2015 199%, tahun 2016 93%, tahun 2017 62%. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada gambar grafik 5.1 dibawah ini



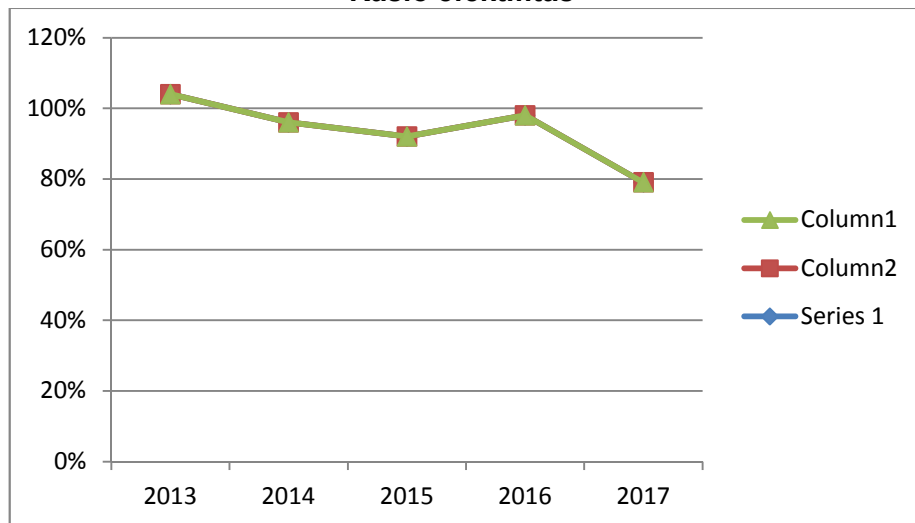
Dari grafik tersebut maka bisa dilihat bahwa terjadi fluktuasi terjadi kenaikan dan penurunan dan dapat dilihat mulai dari tahun 2014 dan 2017 terjadi penurunan secara drastis mengenai kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud disini adalah Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dilihat dari rekapitulasi rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013 posisi keuangan 180% dikategorikan sangat efektif, 2014 posisi keuangan mengalami kenaikan 197% berarti ada peningkatan kemandirian keuangan daerah dikategorikan sangat efektif, 2015 posisi keuangan masih mengalami kenaikan 199% dikategorikan sangat efektif, dan pada 2016 posisi keuangan 93% dikategorikan efektif, 2017 posisi keuangan dikategorikan kurang efektif. terjadi penurunan secara drastis yaitu 62%.

b. Rasio efektifitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio maka diperoleh data sebagai berikut pada tahun 2013 rasio efektifitas berada pada titik 104%, tahun 2014 mengalami penurunan dan berada pada titik 96%, tahun 2015 kembali mengalami penurunan 92%, tahun 2016 terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan dan berada pada titik 98%, tahun 2017 kembali mengalami penurunan dan berada pada titik 79%. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada gambar grafik 5.1 dibawah ini.

Grafik 5.2
Rasio efektifitas

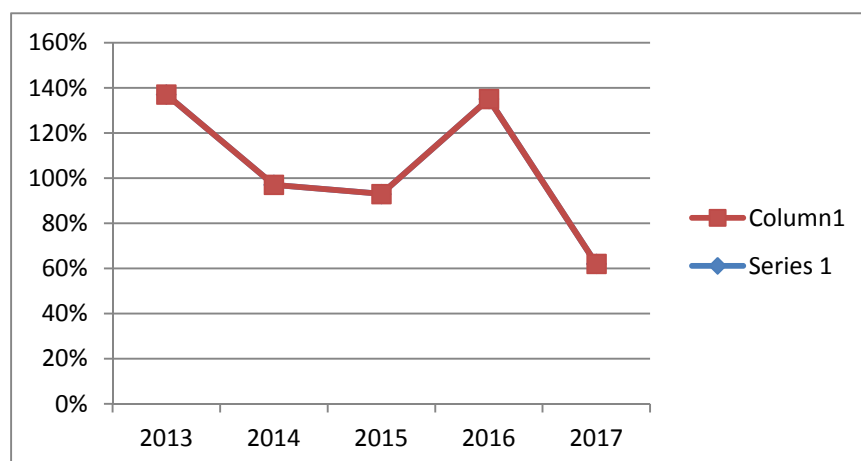


Dari grafik tersebut maka bisa dilihat bahwa terjadi fluktuasi terjadi kenaikan dan penurunan dan dapat dilihat mulai dari tahun 2013 dan 2017 terjadi penurunan mengenai rasio efektifitas. Rasio efektifitas yang dimaksud disini adalah rasio yang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dilihat dari rekapitulasi rasio efektifitas dari tahun 2013 posisi keuangan 104% dikategorikan sangat efektif, 2014 posisi keuangan mengalami penurunan 96% berarti ada penurunan ke efektifan keuangan daerah tapi masih dikategorikan efektif, 2015 posisi keuangan mengalami penurunan 92% masih juga dikategorikan efektif, dan pada 2016 posisi keuangan 98% dikategorikan efektif, 2017 posisi keuangan dikategorikan kurang efektif. terjadi penurunan menjadi 79%.

c. Rasio pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio maka diperoleh data sebagai berikut pada tahun 2013 rasio pertumbuhan berada pada titik 137%, tahun 2014 menurun dan berada pada titik 97%, tahun 2015 penurunannya berlanjut dan berada pada titik 93%, tahun 2016 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan berada pada titik 135%, tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis yang mengakibatkan rasio pertumbuhan berada pada titik 62%. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada gambar grafik 5.3 dibawah ini.

Grafik 5.3
Rasio pertumbuhan



Dari grafik tersebut maka bisa dilihat bahwa terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan dan dapat dilihat mulai dari tahun 2013 dan 2017 terjadi penurunan mengenai rasio pertumbuhan. Yang dimaksud dengan rasio pertumbuhan adalah semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dilihat dari rekapitulasi rasio pertumbuhan dari tahun 2013 posisi keuangan 137% dikategorikan sangat efektif, 2014 posisi keuangan mengalami penurunan 97% tapi masih dikategorikan efektif,

2015 posisi keuangan mengalami penurunan 93% masih juga dikategorikan efektif, dan pada 2016 posisi keuangan mengalami kenaikan lagi 135% dikategorikan efektif, 2017 posisi keuangan dikategorikan kurang efektif. karena terjadi penurunan drastis menjadi 62%.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun 2013- 2017 memperlihatkan peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun ke tahun. hal ini berarti bahwa terdapat peningkatan pada pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, meningkatnya pendapatan asli daerah ini disebabkan karena meningkatnya pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok. Dan meningkatnya lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas pajak daerah tahun 2013-2017 menunjukkan ada perubahan yang berfluktuasi, sebagian besar rasio efektivitas termasuk kategori sangat efektif, kecuali tahun 2014- 2016 termasuk kategori efektif, hal ini disebabkan pajak daerah yang memiliki kontribusi yang besar pada pajak daerah tahun tersebut tidak terealisasi sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

3. Rasio pertumbuhan

Menurut uraian dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan tahun 2013-2014 badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan telah digolongkan berhasil dalam mempertahankan pertumbuhan PAD, dan belanja operasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dari segi pendapatan asli daerah badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dapat dilihat dari ketiga rasio berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2013 sampai 2017 memiliki pola hubungan instruktif dimana tingkat ketergantungan pihak ekstern masih sangat tinggi yang meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok.

2. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas tahun anggaran 2013 memiliki kriteria sangat efektivitas dan tahun seterusnya memiliki kriteria efektif artinya kemampuan badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah efektif atau mencapai target.

3. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan kemampuan badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya terbukti pada perhitungan rasio pertumbuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan, penulis memberikan saran agar badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan memaksimalkan tagihan pajak yang merupakan salah satu indikator penurunan dalam hal kolektibilitas tagihan pajak. Sehingga sumber pendapatan daerah menjadi meningkat. Dan perlu ada juru penagihan khusus.

**Berikut akan digambarkan gambaran pendapatan asli daerah
badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan tahun anggaran
2013-2017**

**Tabel 3.1
Gambaran Pendapatan ASLI Daerah Badan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

No	Uraian pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.1	Pendapatan asli daerah		
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	2.336.516.471.172,00	2.253.427.933.668,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	69.783.226.700,00	60.528.670.325,63
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	71.344.948.623,00	71.057.298.623,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah	163.516.000.000,00	175.031.729.895,17
Jumlah pendapatan asli daerah		2.477.808.162.495,00	2.560.045.632.511,80
1.2	Dana perimbangan		
1.2.1	Bagi hasil pajak,/bagi hasil bukan pajak	310.706.342.541,00	268.130.040.457,00
1.2.2			
1.2.3	Dana alokasi umum	1.089.771.438.000,00	1.089.771.438.000,00
1.2.4	Dana alokasi khusus	64.264.340.000,00	64.264.340.000,00
Jumlah dana perimbangan		1.467.742.120.541,00	1.422.165.818.457,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1.3.1	Pendapatan hibah dari pemerintah	9.329.710.000,00	9.966.224.101,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah		9.329.710.000,00	9.966.224.101,00

Sumber data : APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan

Tabel 3.1
Gambaran Pendapatan ASLI Daerah Badan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

No	Uraian pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.1	Pendapatan asli daerah		
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	2.807.473.546.589,00	2.667.266.552.726,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	84.296.297.700,00	94.595.826.667,38
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	74.599.105.139,00	74.599.105.137,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah	162.495.464.444,00	192.660.753.965,40
Jumlah pendapatan asli daerah		3.128.864.413.870,00	3.029.122.238.490,00
1.2	Dana perimbangan		
1.2.1	Bagi hasil pajak,/bagi hasil bukan pajak	292.999.149.734,00	248.811.019.824,00
1.2.2			
1.2.3	Dana alokasi umum	1.209.598.741.000,00	1.209.598.741.000,00
1.2.4	Dana alokasi khusus	72.976.480.000,00	72.976.480.000,00
Jumlah dana perimbangan		1.293.281.724.955,00	1.249.093.595045,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1.3.1	Pendapatan hibah dari pemerintah	13.517.291.000,00	9.891.034.271,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah		13.517.291.000,00	9.891.034.271,00

Sumber data : APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan

Tabel 3.1
Gambaran Pendapatan ASLI Daerah Badan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

No	Uraian pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.1	Pendapatan asli daerah		
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	3.067.502.651.500,00	2.902.245.605.671,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	93.119.020.200,00	94.314.412.509,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	89.014.306.746,00	88.982.067.486,94
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah	183.062.270.850,00	88.982.067.486,00
Jumlah pendapatan asli daerah		3.438.698.249.296,00	3.174.524.153.152,94
1.2	Dana perimbangan		
1.2.1	Bagi hasil pajak,/bagi hasil bukan pajak	281.792.298.000,00	188.057.830.411,00
1.2.2			
1.2.3	Dana alokasi umum	1.180.010.167.000,00	1.180.010.167.000,00
1.2.4	Dana alokasi khusus	278.357.990.000,00	222.686.392.000,00
Jumlah dana perimbangan		1.740.160.455.000,00	1.590.754.389.411,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1.3.1	Pendapatan hibah dari pemerintah	24.664.027.000,00	25.357.030.916,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah		24.664.027.000,00	25.357.030.916,00

Sumber data : APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan

Tabel 3.1
Gambaran Pendapatan ASLI Daerah Badan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

No	Uraian pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.1	Pendapatan asli daerah		
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	3.145.435.142.000,00	3.079.662.364.379,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	85.538.676.800,00	86.532.573.010,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	106.759.668.458,00	106.759.668.458,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah	179.063.752.725,00	176.606.702.257,52
Jumlah pendapatan asli daerah		3.512.797.239.983,00	3.449.561.308.104,52
1.2	Dana perimbangan		
1.2.1	Bagi hasil pajak,/bagi hasil bukan pajak	271.491.373.720,00	314.343.523.186,00
1.2.2			
1.2.3	Dana alokasi umum	1.394.148.361.000,00	1.394.148.361.000,00
1.2.4	Dana alokasi khusus	2.164.133.803.000,00	2.164.133.803.000,00
Jumlah dana perimbangan		3.829.773.537.720,00	3.872.625.687.186,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1.3.1	Pendapatan hibah dari pemerintah	11.929.452.000,00	8.210.709.417,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah		11.929.452.000,00	8.210.709.417,00

Sumber data : APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan

Tabel 3.1
Gambaran Pendapatan ASLI Daerah Badan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Uraian pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.1	Pendapatan asli daerah		
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	3.319.485.000.000,00	2.601.044.789.877,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	91.292.381.697,00	63.664.059.963,20
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	127.005.836.497,00	126.659.886.496,83
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah	205.561.302.337,00	175.737.458.195,20
Jumlah pendapatan asli daerah		3.743.344.520.531,00	2.967.106.194.532,23
1.2	Dana perimbangan		
1.2.1	Bagi hasil pajak,/bagi hasil bukan pajak	331.954.922.099,00	258.946.248.540,00
1.2.2			
1.2.3	Dana alokasi umum	2.509.480.255.000,00	2.239.552.964.000,00
1.2.4	Dana alokasi khusus	2.676.714.860.000,00	2.215.376.498.700,00
Jumlah dana perimbangan		5.518.150.037.099,00	4.713.875.711.240,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1.3.1	Pendapatan hibah dari pemerintah	12.779.473950,00	10.469.278.760,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah		12.779.473950,00	10.469.278.760,00

Sumber data : APBD badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Rp)	Total Pendapatan (APBD) (Rp)	Persentase Kenaikan Per Tahun
2013	2.560.045.632.511.80	1.422.165.818.457.00	885.381.160.744.00	4.867.592.611.712.80	
2014	3.029.122.238.495.78	1.531.386.240.824.00	942.652.926.746.00	5.503.161.406.065.78	32.06
2015	3.270.829.511.466.51	1.590.754.389.411.00	1.244.232.194.680.00	6.105.815.095.557.51	10.95
2016	3.449.561.308.104.52	3.704.816.673.661.00	8.210.709.417.00	7.162.588.691.182.52	17.31
2017	2.967.106.194.532.23	4.721.375.711.240.00	10.469.278.760.00	7.698.951.184.532.23	7.49
jumlah	15.276.663.885.111	12.970.498.833.593	3.090.946.270.347	31.338.108.989.051	0.10

Sumber Data : APBD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN			REALISASI			REALISASI %
		T.A. 2013	3	4	5	6	7	
4 1 1	PENDAPATAN	4.996.499.337.036.00	4.521.921.900.292.10	345.670.703.400.70	4.867.592.611.712.60	97.42		
4 1 1 01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.641.180.646.485.00	2.297.875.469.175.10	262.176.163.336.70	2.560.045.632.541.80	96.93		
4 1 1 01 01	PALJAK DAERAH	2.336.516.471.172.00	2.032.745.171.938.00	220.582.761.730.00	2.253.427.933.688.00	96.44		
4 1 1 01 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor	714.433.893.000.00	659.476.824.689.00	72.251.965.694.00	722.728.730.273.00	101.16		
4 1 1 01 01 01 01	A-1 Srdan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	316.102.500.000.00	294.614.758.302.00	33.761.970.350.00	318.376.726.652.00	100.72		
4 1 1 01 01 01 01 01	A-2 Srdan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1.776.152.000.00	1.624.360.750.00	157.335.000.00	1.567.025.750.00	87.67		
4 1 1 01 01 01 01 01 01	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.330.310.000.00	1.087.122.294.00	123.972.000.00	1.211.094.294.00	89.93		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	146.876.400.000.00	134.015.310.154.00	14.483.148.954.00	148.498.459.108.00	101.10		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	8.915.000.000.00	8.697.750.381.00	1.161.032.400.00	9.858.782.781.00	111.94		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	3.478.200.000.00	2.981.060.800.00	67.254.727.00	2.148.315.527.00	61.77		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	223.040.000.000.00	208.979.079.801.00	20.853.210.240.00	227.832.290.041.00	102.15		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	3.330.000.000.00	2.915.944.042.00	514.960.000.00	3.430.904.042.00	103.03		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	A-3 Srdan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	162.500.000.00	134.409.475.00	24.430.000.00	158.839.475.00	97.76		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	1.086.000.000.00	1.059.006.290.00	231.871.500.00	1.289.877.790.00	118.77		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	125.000.000.00	2.406.000.00	30.214.403.00	32.622.403.00	26.10		
4 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	1.086.000.000.00	1.046.245.590.00	180.399.500.00	1.226.645.090.00	112.94		
4 1 1 02	Pajak Kendaraan Di Atas Air							
4 1 1 03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.128.938.000.000.00	931.595.206.240.00	106.139.204.125.00	1.038.135.410.365.00	91.86		
4 1 1 03 01	A-1 Srdan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	551.880.000.000.00	442.666.026.370.00	56.369.480.000.00	499.035.506.370.00	90.42		
4 1 1 03 01 01	A-2 Srdan, Jeep, Station Wagon (Umum)	4.639.500.000.00	2.639.225.500.00	67.599.000.00	2.906.824.500.00	62.65		
4 1 1 03 01 01 01	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.802.000.000.00	1.316.025.000.00	89.250.000.00	1.405.275.000.00	77.98		
4 1 1 03 01 01 01 01	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1.925.000.000.00	1.548.825.500.00	457.544.000.00	2.006.370.500.00	104.23		
4 1 1 03 01 01 01 01 01	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	171.637.500.000.00	145.325.772.000.00	13.381.087.000.00	158.706.859.000.00	92.47		
4 1 1 03 01 01 01 01 01 01	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	33.810.000.000.00	25.863.166.000.00	4.474.856.000.00	30.338.024.000.00	89.73		
4 1 1 03 01 01 01 01 01 01 01	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	1.249.500.000.00	713.058.750.00	33.995.625.00	747.042.375.00	59.79		
4 1 1 03 01 01 01 01 01 01 01 01	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	309.890.000.000.00	296.402.157.100.00	38.474.671.000.00	334.876.728.100.00	95.34		
4 1 1 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01	E-1 Kendaraan Khusus (Dinas)	12.825.000.000.00	9.247.510.000.00	3.112.895.000.00	13.360.405.000.00	83.34		
4 1 1 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	A-3 Srdan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	340.000.000.00	325.759.000.00	72.750.000.00	398.509.000.00	117.21		
4 1 1 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	4.812.500.000.00	3.789.985.000.00	856.200.000.00	4.645.185.000.00	97.35		
4 1 1 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	202.000.000.00	2.020.000.000.00	60.869.500.00	2.080.869.500.00	30.13		
4 1 1 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	4.125.000.000.00	2.956.105.070.00	459.116.000.00	3.415.221.070.00	82.84		
4 1 1 04	Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air							

KODE REKENING	URAIAN		TARGET PERUBAHAN T.A. 2013	REALISASI SID BLN. NOVEMBER	REALISASI BL. DESEMBER	REALISASI SID BULAN INI	%
	1	2					
4 1 1 05		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	401.468.142.959,00	365.038.997.718,00	41.206.105.726,00	406.243.063.444,00	101,19
4 1 1 05 01		Bensin Premium	216.541.793.277,00	204.697.171.780,00	22.883.742.857,00	227.580.914.637,00	105,08
4 1 1 05 02		Perenzawarbensin	3.175.169.210,00	3.017.029.373,00	537.841.273,00	4.154.892.646,00	110,06
4 1 1 05 03		Pajak Parkir					
4 1 1 05 04		Solar	181.051.160.472,00	156.752.704.265,00	17.694.421.596,00	174.427.205.861,00	96,35
4 1 1 05 05		Gas					
4 1 1 06		Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	91.676.436.213,00	85.235.183.381,00	1.095.546.195,00	86.220.728.586,00	94,16
4 1 1 06 01		Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	91.676.436.213,00	85.235.183.381,00	1.095.546.195,00	86.220.728.586,00	94,16
4 1 2		RETRIBUSI DAERAH	60.783.226.700,00	50.798.775.145,00	9.728.895.180,83	60.528.670.325,83	86,74
4 1 2 01		Retribusi Jasa Umum	50.454.200.000,00	35.885.538.740,00	6.195.089.608,63	42.078.628.348,63	83,40
4 1 2 01 01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	45.533.500.000,00	31.929.233.340,00	5.953.972.308,63	37.883.206.848,63	83,20
		- Ambulans / Karos	322.477.000,00	320.208.400,00	32.186.400,00	321.394.800,00	115,17
		- Praktek / Operasi	317.842.400,00	312.834.100,00	20.332.400,00	320.166.500,00	89,76
		- Rawat Inap Umum	536.750.000,00	580.186.500,00	85.526.000,00	665.222.500,00	123,94
		- Obol-obatan	1.293.860.000,00	1.483.488.141,00	182.800.000,00	1.666.288.141,00	128,79
		- PHB / Askes / Jamkesmas / Jamkesda / Jamkeslek	19.760.802.398,00	11.805.134.789,73	3.006.871.428,83	14.811.006.218,56	75,88
		b. Askes-Sosial	3.332.658.218,00	2.690.541.464,80	433.125.367,00	3.123.666.831,80	93,43
		c. Bantuan Kesehatan Gratis	7.827.270.000,00	6.207.974.732,00	2.623.104.104,00	8.831.078.836,00	112,93
		d. Jamkesmas	8.140.000,00	2.141.704.164,00	1.140.400,00	9.282.104,164,00	112,93
		e. Jamkesda	1.500.000,00	3.372.800,00	1.140.400,00	4.513.200,00	129,61
		f. Laboratorium	2.141.704.164,00	1.997.788.800,00	420.940.200,00	2.418.729.000,00	112,93
		- Radiologi	484.060.000,00	469.180.000,00	80.726.000,00	549.906.000,00	113,14
		- Jasa Konsultasi Medik	15.221.158.985,00	9.257.852.543,14	2.037.821.387,00	11.295.673.930,14	74,21
		- Klinik Askes, Jamkesmas, Jamkesmas dan Jamkostek. Tin. 2012	15.736.140.000,00	12.610.000,00	1.200.000,00	14.010.000,00	88,95
4 1 2 01 09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.278.315.053,00	5.277.751.826,13	1.200.000,00	5.277.751.826,13	103,75
4 1 2 01 10		Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.672.700.000,00	2.811.050.000,00	8.450.000,00	2.822.100.000,00	76,83
4 1 2 01 11		Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.360.000.000,00	1.142.654.800,00	232.668.700,00	1.375.323.500,00	101,88
4 1 2 02		Retribusi Jasa Usaha	18.414.026.700,00	14.134.328.855,00	3.300.298.462,00	17.434.628.317,00	95,17
4 1 2 02 01		Retribusi Pemakaman Kekayaan Daerah (RPKD)	13.432.432.700,00	11.504.894.004,00	2.957.470.352,00	13.862.364.356,00	103,16
4 1 2 02 05		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	185.694.000,00	182.907.000,00	11.274.000,00	194.181.000,00	104,67
4 1 2 02 08		Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	3.614.700.000,00	2.000.808.851,00	985.914.100,00	3.086.722.951,00	80,39
4 1 2 02 09		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	976.200.000,00	365.730.000,00	35.640.000,00	401.370.000,00	41,03
4 1 2 03		Retribusi Perizinan Tertentu	915.000.000,00	760.960.550,00	144.507.120,00	905.467.670,00	101,14
4 1 2 03 01		Retribusi Pajak	500.000.000,00	400.000.000,00	135.832.100,00	535.832.100,00	107,16
4 1 2 03 02		Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pempizew	415.000.000,00	360.960.550,00	7.675.020,00	428.635.570,00	103,20

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN		REALISASI S/D		REALISASI S/D		%
		1.A. 3013	1.A. 3013	BUN, NOVEMBER	BUN, DESEMBER	REALISASI S/D	REALISASI S/D	
		1.A. 3013	1.A. 3013	1.A. 3013	1.A. 3013	1.A. 3013	1.A. 3013	
4 1 3	HASIL PENGELUARAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIMISAHKAN	71.344.946.623,00	70.782.296.623,00	70.782.296.623,00	275.000.000,00	71.087.296.623,00	275.000.000,00	98,60
4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal (BUMD)	562.650.000,00	-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	-
4 1 3 01 01	Perusda Sda-Sri	562.650.000,00	-	-	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	-
4 1 3 02	Bagian Laba Keuangan Bank	69.088.790.029,00	69.088.790.029,00	69.088.790.029,00	-	69.088.790.029,00	69.088.790.029,00	100,00
4 1 3 02 01	PT. Bank Sulawesi Selatan	69.088.790.029,00	69.088.790.029,00	69.088.790.029,00	-	69.088.790.029,00	69.088.790.029,00	100,00
4 1 3 03	Bagian Laba Penyertaan Modal (BUMN)	1.693.518.594,00	1.693.518.594,00	1.693.518.594,00	-	1.693.518.594,00	1.693.518.594,00	100,00
4 1 3 03 01	PT. KIMIA	670.200.000,00	670.200.000,00	670.200.000,00	-	670.200.000,00	670.200.000,00	100,00
4 1 3 03 02	PT. KIMIA	660.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	-	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00
4 1 3 03 03	PT. ASKRIDA	363.318.594,00	363.318.594,00	363.318.594,00	-	363.318.594,00	363.318.594,00	100,00
4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	163.516.000.000,00	143.549.232.469,10	143.549.232.469,10	31.482.506.426,07	175.031.728.895,17	175.031.728.895,17	107,64
4 1 4 01	Hasil Perjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	278.000.000,00	398.200.203,00	398.200.203,00	723.490.000,00	1.111.690.203,00	1.111.690.203,00	398,45
4 1 4 01 04	Perjualan Rumah Jabatan/ Eks Rumah Dinas	19.000.000,00	10.455.203,00	10.455.203,00	6.690.000,00	17.135.203,00	17.135.203,00	90,19
4 1 4 01 05	Perjualan Kendaraan Roda Empat / Eks Kendaraan Dinas	10.000.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00	11.350.000,00	19.295.000,00	19.295.000,00	192,95
4 1 4 01 06	Perjualan Kendaraan Roda Empat / Eks Kendaraan Dinas	250.000.000,00	369.800.000,00	369.800.000,00	705.450.000,00	1.075.250.000,00	1.075.250.000,00	439,10
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	25.000.000.000,00	16.670.583.804,20	16.670.583.804,20	1.082.832.096,35	17.753.415.900,55	17.753.415.900,55	71,01
4 1 4 02 01	Jasa Giro Daerah	25.000.000.000,00	15.213.787.745,46	15.213.787.745,46	898.111.677,35	16.111.899.422,81	16.111.899.422,81	64,45
4 1 4 02 02	Jasa Giro Kabupaten/Kota	-	90.872.133,74	90.872.133,74	7.045.897,00	69.918.020,74	69.918.020,74	-
4 1 4 02 04	Jasa Giro Dana BOS	-	1.365.923.925,00	1.365.923.925,00	177.674.532,00	1.543.598.457,00	1.543.598.457,00	-
4 1 4 04	Tuntutan Garansi Kerugian Daerah	4.000.000.000,00	19.299.954.879,52	19.299.954.879,52	416.305.327,00	19.705.560.447,52	19.705.560.447,52	-
4 1 4 04 01	Kerugian Uang	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	416.305.327,00	19.705.560.447,52	19.705.560.447,52	-
4 1 4 04 02	Kerugian Barang	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	172.445.662,00	172.445.662,00	284.414.813,06	456.560.465,00	456.560.465,00	-
4 1 4 06 01	Bidang Pendidikan	-	30.700,00	30.700,00	1.925.078,00	60.700,00	60.700,00	-
4 1 4 06 02	Bidang Kesehatan	-	2.414.552,00	2.414.552,00	96.325.706,00	100.640.250,00	100.640.250,00	-
4 1 4 06 03	Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06 04	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06 05	Bidang Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06 06	Bidang Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06 07	Bidang Perencanaan Modal	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06 16	Bidang Kebudayaan	-	156.475.400,00	156.475.400,00	-	156.475.400,00	156.475.400,00	-
4 1 4 06 17	Bidang Kerjasama dan Olah raga	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06 18	Bidang Pemerintahan Umum	-	-	-	11.725.200,00	11.725.200,00	11.725.200,00	-
4 1 4 06 20	Bidang Kespawahan	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06 21	Bidang Koperasi	-	6.357.330,00	6.357.330,00	-	115.470.149,00	115.470.149,00	-
4 1 4 06 22	Bidang Perumahan Masyarakat	-	554.700,00	554.700,00	-	2.381.010,00	2.381.010,00	-
4 1 4 06 30	Bidang Keairan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
4 1 4 06 31	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-

KODE REKENING	URUTAN	TARGET PERUBAHAN T.A. 2013	REALISASI S/D		REALISASI S/D		%
			BLN. NOVEMBER	BL. DESEMBER	BL. NOVEMBER	BL. DESEMBER	
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak	22.850.000.000,00	18.597.073.455,00	2.485.267.531,00	21.072.340.986,00	92,22	
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda P.K.B	17.697.322.000,00	17.697.322.000,00	2.400.728.321,00	20.077.051.184,00	91,08	
4 1 4 07 03	Pendapatan Denda BBN-KB	950.000.000,00	919.750.552,00	75.539.210,00	995.290.802,00	104,77	
4 1 4 10 01	Pendapatan dari Pengembalian	30.000.000.000,00	35.181.147.265,32	2.204.892.735,00	37.386.040.001,32	-	
4 1 4 10 02	Pengembalian dari Pajak, Pasal 21	-	691.798.994,00	(3.569.552,00)	688.229.442,00	-	
4 1 4 10 03	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan	-	30.182.058.341,32	474.731.229,00	32.656.789.570,32	-	
4 1 4 10 04	Pengembalian dari Uang Muka	30.000.000.000,00	2.307.289.831,00	1.733.031.058,00	4.040.320.889,00	-	
4 1 4 10 05	Pengembalian dan Pengembalian Dana BOS	-	-	-	-	-	
4 1 4 10 06	Pengembalian dari Sisa Pengembalian Kas	-	-	-	-	-	
4 1 4 10 07	Facilities Sosial dan Fasilitas Umum	81.387.000.000,00	53.281.618.266,06	24.285.200.923,72	77.566.822.191,78	95,28	
4 1 4 11 04	Lain Lain Penerimaan Yang Sahn	80.597.000.000,00	71.632.197,82	260.441.310,00	76.955.743.512,82	112,20	
4 1 4 11 05	Bantuan Layanan Umum Daerah	1.790.000.000,00	1.649.416,24	24.859.612,72	1.790.000.000,00	100,00	
4 1 4 11 06	Bantuan Sosial dan Lain Lain	39.000.000.000,00	22.797.309.042,24	11.246.588.865,00	33.990.728.917,24	89,47	
4 1 4 11 07	Rumah Sakti Umum Haji	21.600.000.000,00	13.727.507.618,00	7.444.235.739,00	21.171.743.357,00	98,47	
4 1 4 11 08	Rumah Sakti Ibu dan Anak, Sakti Fatmahan	10.000.000.000,00	7.699.513.056,00	1.928.445.631,72	9.698.958.687,72	98,99	
4 1 4 11 09	Rumah Sakti Ibu dan Anak, Sakti Perwati	11.000.000.000,00	8.108.435.351,00	3.365.512.371,00	11.469.997.922,00	104,45	
4 2	DANA PERIMBANGAN	1.464.742.120.541,00	1.343.255.132.603,00	76.910.589.854,00	1.422.165.722.457,00	97,08	
4 2 1	BAGI HASIL PAJAK BAGI HASIL BUKAN PAJAK	310.706.342.541,00	295.295.439.603,00	62.844.600.854,00	265.130.040.457,00	85,30	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	300.065.252.739,00	197.575.125.887,00	59.237.024.801,00	256.812.150.288,00	85,59	
4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	127.372.782.198,00	94.079.718.596,00	24.595.255.430,00	119.774.354.336,00	93,25	
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan	167.701.295.229,00	100.620.771.735,00	33.143.888.769,00	133.794.740.503,00	79,76	
4 2 1 01 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH) Pasal 21, 25, dan 29)	3.031.194.363,00	2.874.058.046,00	1.397.820.449,00	4.272.469.449,00	83,20	
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	10.621.089.811,00	7.710.313.916,00	3.407.576.253,00	11.317.890.159,00	106,56	
4 2 1 02 01	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Alam	20.776.911,00	5.355.387,00	19.865.061,00	25.241.046,00	100,00	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSCH)	696.318.500,00	300.150.790,00	460.575.022,00	820.733.615,00	118,04	
4 2 1 02 03	Bagi Hasil dari Iuran Tebay Landrent	9.898.984.400,00	7.344.799.741,00	282.745.435,00	10.189.059.873,00	102,93	
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi (Royalty)	-	-	-	-	-	
4 2 1 02 05	Bagi Hasil Penerimaan dari Sektor Perimbangan Gas Bumi	-	-	-	-	-	
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	1.098.771.438.000,00	1.098.771.438.000,00	-	1.098.771.438.000,00	100,00	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	1.098.771.438.000,00	1.098.771.438.000,00	-	1.098.771.438.000,00	100,00	
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	64.264.340.000,00	48.198.255.000,00	16.066.085.000,00	64.264.340.000,00	100,00	
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus	64.264.340.000,00	48.198.255.000,00	16.066.085.000,00	64.264.340.000,00	100,00	

**DIREALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN T.A. 2014		REALISASI/SD NOVEMBER	REALISASI BL. DESEMBER	REALISASI/SD BULAN INI	%
		1	2	3	4	5	
4	PENDAPATAN	5.650.575.961.666,00		5.073.875.161.335,80	429.282.244.729,98	5.503.161.406.065,78	97,39
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.128.664.413.872,00		2.389.775.297.002,00	352.798.826.179,98	3.042.574.123.181,98	96,81
4	PAJAK DAERAH	804.194.220.000,00		724.999.589.805,00	277.491.255.774,00	2.667.265.522.726,00	95,01
4	01 Pajak Kendaraan Bermotor	360.905.000.000,00		326.932.697.300,00	86.245.570.007,00	813.245.129.812,00	100,63
4	01 01 A-1 Sedian, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	1.715.400.000,00		6.373.271.350,00	42.022.842.450,00	369.555.739.750,00	102,40
4	01 01 03 B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	161.184.800.000,00		1.075.923.800,00	755.048.500,00	7.128.319.850,00	65,73
4	01 01 04 C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	9.430.800.000,00		147.181.173.000,00	249.493.000,00	1.173.568.800,00	68,41
4	01 01 05 C-2 Truck, Pick Up (Umum)	3.825.000.000,00		13.059.151.800,00	17.246.765.665,00	1.410.666.000,00	99,00
4	01 01 06 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)			3.291.428.901,00	17.246.765.665,00	14.035.146.352,00	158,37
4	01 01 08 D-2 Kendaraan Khusus (Umum)			219.992.992.005,00	202.868.929,00	3.464.317.420,00	91,35
4	01 01 09 E Sepeda Motor, Scooter	253.260.000.000,00		3.281.877.000,00	23.619.600.050,00	243.812.592.655,00	96,27
4	01 01 10 F Sepeda Motor, Scooter (Pribadi)	2.940.000.000,00		155.008.000,00	724.179.000,00	4.006.047.000,00	136,26
4	01 01 11 G-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	147.900.000,00		1.396.078.000,00	52.533.000,00	207.603.000,00	140,37
4	01 01 12 C-3 Truck Pick Up (Dinas)	42.500.000,00		1.329.000,00	344.238.000,00	1.710.278.000,00	123,26
4	01 01 14 D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)			1.129.781.250,00	223.100.000,00	116.565.664,00	274,27
4	01 01 13 E Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1.247.400.000,00				1.352.897.250,00	108,46
4	01 02 Pajak Kendaraan Di Atas Air						
4	01 03 01 Bus Balok Nona Kendaraan Bermotor	1.161.371.000.000,00		911.922.816.977,00	104.695.823.246,00	1.016.618.442.123,00	87,49
4	01 03 02 A-1 Sedian, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	358.425.000.000,00		422.339.195.510,00	51.291.680.000,00	473.630.875.510,00	84,82
4	01 03 03 A-2 Sedian, Jeep, Station Wagon (Umum)	1.003.500.000,00		1.003.500.000,00	34.311.000,00	1.107.885.000,00	58,89
4	01 03 04 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.507.500.000,00		2.428.323.000,00	175.115.000,00	1.279.105.000,00	84,85
4	01 03 05 B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	3.232.000.000,00		115.470.036.000,00	13.902.611.000,00	47.472.000,00	73,13
4	01 03 06 C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	165.000.000.000,00		32.715.318.600,00	5.267.038.000,00	37.982.356.600,00	117,05
4	01 03 07 C-2 Truck, Pick Up (Umum)	32.456.000.000,00		5.329.094.025,00	70.298.746,00	5.399.892.771,00	1521,12
4	01 03 08 D-2 Kendaraan Khusus (Pribadi)	355.000.000,00					
4	01 03 09 E Sepeda Motor, Scooter	375.015.500.000,00		313.867.185.005,00	29.823.509.000,00	343.690.694.005,00	91,59
4	01 03 10 A-3 Sedian, Jeep, Station Wagon (Dinas)	15.725.000.000,00		10.169.189.000,00	2.000.000,00	12.169.189.000,00	78,31
4	01 03 11 B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	620.000.000,00		395.875.000,00	179.125.000,00	574.900.000,00	92,74
4	01 03 12 C-3 Truck Pick Up (Dinas)	4.040.000.000,00		3.528.415.000,00	1.405.225.000,00	4.933.640.000,00	122,12
4	01 03 14 D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)			27.252.617,00		27.252.617,00	
4	01 03 13 E Sepeda Motor, Scooter (Dinas)			3.266.190.100,00	656.270.500,00	3.922.460.600,00	104,60
4	01 04 Bus Balok Nona Kendaraan Di Atas Air	3.750.000.000,00					

HASIL AUDIT

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN T.A. 2014			REALISASI S/D	REALISASI	REALISASI S/D	%
		1	2	3	NOVEMBER	BLDISEMBER	NOVEMBER	
4 1 1 05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	475.451.476.089,00		442.721.339.576,00	44.284.124.700,00	487.005.464.276,00	102,43	
4 1 1 05 01	Bensin/Premium	272.114.712.430,00		258.705.334.695,00	26.224.337.313,00	284.939.671.979,00	104,71	
4 1 1 05 02	Pertamax/Premis	3.418.032.670,00		5.091.934.943,00	798.810.666,00	5.890.745.609,00	171,47	
4 1 1 05 03	Pertamax Plus			279.229.457,00	57.632.879,00	336.862.436,00	120,71	
4 1 1 05 04	Solar	199.919.729.989,00		178.644.840.511,00	17.223.343.742,00	195.868.184.253,00	97,97	
4 1 1 05 05	Gas							
4 1 1 06	Pajak Pengambilan dan Pemeliharaan Air Permukaan	91.856.851.500,00		104.869.493.337,00	871.442.480,00	105.740.935.817,00	115,11	
4 1 1 06 01	Pajak Pengambilan dan Pemeliharaan Air Permukaan	91.856.851.500,00		104.869.493.337,00	871.442.480,00	105.740.935.817,00	115,11	
4 1 1 07	Pajak Rokok	270.000.000.000,00		265.382.085.407,00	33.394.485.291,00	244.656.580.698,00	90,61	
4 1 1 07 01	Pajak Rokok	270.000.000.000,00		265.382.085.407,00	33.394.485.291,00	244.656.580.698,00	90,61	
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	84.296.297.700,00		70.718.398.442,38	23.877.428.225,00	94.995.826.697,38	112,22	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	62.018.300.000,00		55.991.667.390,38	20.638.842.147,00	76.531.469.537,38	123,40	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	49.410.500.000,00		47.949.398.440,38	17.039.499.207,00	64.988.897.737,38	132,73	
	- Rawat Inap							
	- Rawat Jalan	361.183.439,00		362.018.393,00	36.247.800,00	398.266.193,00	113,44	
	- Triasana/Operasi	364.562.000,00		363.870.500,00	36.247,00	398.117,00	109,44	
	- Rawat Inap Umum	616.535.200,00		392.003.045,00	38.931.600,00	430.934.645,00	69,90	
	- Obat-obatan	2.108.577.036,00		1.580.185.008,00	169.168.050,00	1.758.373.057,00	83,30	
	- PHG /Ases / Jamkesmas / Jamkesda / Jamkesmas	23.389.140.695,00		20.165.948.874,72	4.099.430.445,00	24.265.378.069,72	103,75	
	a. Pokok Sosial	14.622.386.743,00		11.987.622.604,00	1.418.194.405,00	13.305.817.009,00	91,00	
	b. Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.131.743.962,00		7.819.002.235,00	2.657.247.240,00	10.476.249.475,00	119,88	
	c. Jamkesmas	35.666.000,00		41.920.000,00	23.988.000,00	451.333.885,72	1.289,53	
	d. Jamkesda							
	e. Jamkesmas							
	- Laboratorium	2.596.380.000,00		2.725.168.776,00	102.308.700,00	2.827.477.476,00	111,21	
	- Ambulance	506.820.000,00		522.505.000,00	77.780.000,00	600.285.000,00	118,44	
	- Jasa Kesehatan Medik	845.000,00		350.000,00	90.000,00	450.000,00	59,77	
	- Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya	18.300.819.334,00		15.905.845.121,28	2.883.594.357,00	18.789.439.478,28	102,67	
	- Klinik	25.500.000,00		9.724.200,00	930.000,00	10.654.200,00	41,78	
	- Mitra Pelayanan Kesehatan dan Jamkesmas Tim 2013	1.156.317.315,00		5.982.769.572,38	10.138.265.436,00	16.121.035.008,38	1.384,15	
4 1 2 01 04	Retribusi Pengambilan Biaya Cetak Peta	1.472.300.000,00		1.016.318.050,00				
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Pendidikan	11.120.500.000,00		6.925.960.000,00				
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	20.727.997.700,00		14.070.865.652,00	3.107.263.278,00	17.178.068.930,00	82,87	
4 1 2 02 01	Retribusi Penyediaan Pelayanan Kesehatan (RPHK)	16.231.167.700,00		10.573.694.792,00	1.905.774.478,00	12.479.579.270,00	76,89	
4 1 2 02 04	Retribusi Pelayanan Kesehatan	159.339.200,00		159.339.200,00	20.793.000,00	378.132.200,00	84,03	
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	205.000.000,00		159.339.200,00				
4 1 2 02 08	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	3.841.830.000,00		2.943.277.600,00	1.187.488.800,00	4.130.744.400,00	107,00	
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.550.000.000,00		755.865.400,00	130.422.800,00	886.288.200,00	57,18	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Trayek	1.500.000.000,00		720.660.400,00	121.407.800,00	842.068.200,00	56,14	
4 1 2 03 02	Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemprov.	50.000.000,00		35.205.000,00	9.015.000,00	44.220.000,00	88,44	

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN T.A. 2014			REALISASI SID NOVEMBER	REALISASI BL. DESEMBER	REALISASI SID BULAN INI	%
		1.	2.	3.				
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							
4 1 3 01 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal (BUND)	74.599.105,137.00		74.599.105,137.00		74.599.105,137.00	100.00	
4 1 3 01 02	Penunda Sul-Sol	73.027.479,258.00		73.027.479,258.00		73.027.479,258.00	100.00	
4 1 3 01 02	PT. Bank Sulawesi Selatan	427.579,590.00		427.579,590.00		427.579,590.00	100.00	
4 1 3 03	Bagian Laba Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	72.599.899,675.00		72.599.899,675.00		72.599.899,675.00	100.00	
4 1 3 03	PT. KIMA	1.571.625,884.00		1.571.625,884.00		1.571.625,884.00	100.00	
4 1 3 03	PT. GMTD	452.760,000.00		452.760,000.00		452.760,000.00	100.00	
4 1 3 03	PT. ASKRIDA	660.000,000.00		660.000,000.00		660.000,000.00	100.00	
4 1 3 03		458.865,884.00		458.865,884.00		458.865,884.00	100.00	
4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	162.495,464,444.00		141.230,611,734.42	51.430,142,230.98	192.590,753,965.40	118.56	
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.102.000,000.00		422.598,300.00		422.598,300.00	38.34	
4 1 4 01 02	Penjualan Peralatan/ perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	25.000,000.00						
4 1 4 01 03	Penjualan Mesin Alat-Alat Berat Tidak Terpakai	102.000,000.00						
4 1 4 01 04	Penjualan Rumah Jabatan/ Eks Rumah Dinas							
4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Roda Empat / Eks Kendaraan Dinas	25.000,000.00						
4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Roda Empat / Eks Kendaraan Dinas	550.000,000.00						
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	25.000,000,000.00		422.508,300.00		422.508,300.00	44.47	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Daerah	25.000,000,000.00		19.338.883,651.88	1.625,152,674.41	20.939,036,326.29	83.84	
4 1 4 02 02	Jasa Giro Provinsi			18.295.053,794.88	1.467,039,531.41	19.733.103,316.29	79.01	
4 1 4 02 03	Jasa Giro Kabupaten/Kota			518.510,000.00	104,385.000.00	622.895,000.00	79.01	
4 1 4 02 04	Jasa Giro Dinas BOS			1.052.301,517.00	153,068,758.00	1.205.310,115.00	79.01	
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	25.000,000,000.00		10.675,874,903.88	26,470,000.00	10,762,344,903.88	79.01	
4 1 4 04 01	Kerugian Ganti Kerugian Daerah	25.000,000,000.00		10.675,874,903.88	26,470,000.00	10,762,344,903.88	79.01	
4 1 4 04 02	Kerugian Barang Daerah							
4 1 4 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			209.630,779.00	233,505,857.00	445,136,636.00	118.56	
4 1 4 06 01	Biaya Pendidikan			209.000.000.00		208,000.000.00	100.00	
4 1 4 06 02	Biaya Kesehatan							
4 1 4 06 03	Biaya Pemeliharaan Umum			27.526,208.00	27,526,208.00	27,526,208.00	100.00	
4 1 4 06 04	Biaya Pemeliharaan Ruang			172.082,549.00	118,562,578.00	290,644,927.00	170.00	
4 1 4 06 05	Biaya Pemeliharaan Ruang							
4 1 4 06 07	Biaya Perhubungan							
4 1 4 06 16	Biaya Penanaman Modal							
4 1 4 06 17	Biaya Kebudayaan							
4 1 4 06 18	Biaya Kepemudaran dan Olah raga			560,998.00	18,720,000.00	19,286,998.00	100.00	
4 1 4 06 20	Biaya Pemeliharaan Umum			400,000.00	15,694,182.00	15,694,182.00	100.00	
4 1 4 06 21	Biaya Energi & SDM							
4 1 4 06 22	Biaya Pengadaan							
4 1 4 06 23	Biaya Pengadaan Masyarakat							
4 1 4 06 25	Biaya Perawatan							
4 1 4 06 30	Biaya Keluaran dan Perikanan			39,474,132.00	26,745,087.00	60,219,229.00	118.56	
4 1 4 06 31	Biaya Perindustrian dan Perdagangan			2,802,800.00	17,368,492.00	20,391,292.00	100.00	
4 1 4 06 31				94,500.00		94,500.00	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN T.A. 2014		REALISASI S/D		REALISASI S/D		%
		1	2	NOVEMBER	BLDSEMBER	NOVEMBER	NOVEMBER	
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	33.700.000,00	25.764.853,20	3.770.996,44	3.771.102,96	29.435.192,30	87,49	
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda P.K.B	31.825.000,00	24.463.864,50	-	3.536,21	27.366.766,00	87,95	
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda BBN-KG	1.875.000,00	1.310.104,80	3.770.996,44	186.211,50	1.496.406,30	79,61	
4 1 4 10	Pengembalian dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-	
4 1 4 10 01	Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-	-	-	7.660.841,12	-	
4 1 4 10 03	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan	-	-	-	-	174.059,78	-	
4 1 4 10 06	Pengembalian dari Utang Muka	-	-	1.246.599,17	2.871.028,20	4.217.627,38	-	
4 1 4 10 08	Pengembalian dari Utang Pembiayaan Dana BOS	-	-	2.351.722,49	916.531,47	3.268.253,96	-	
4 1 4 10 07	Pengembalian dari Sisa Pengembalian Kas	-	-	-	-	-	-	
4 1 4 11	Facilitas Sosial dan Fasilitas Umum	102.607.464,44	81.028.818,94	41.937,06	41.937,06	122.965.684,97	119,84	
4 1 4 11 02	Facilitas umum	-	-	-	-	-	-	
4 1 4 11 04	Lain Lain Penerimaan Yang Sah	115.000,00	1.404.775,47	(107.924,60)	(107.924,60)	1.296.850,87	1,12	
4 1 4 11 05	Badan Layanan Umum Daerah	102.492.464,44	79.623.843,47	42.044,90	42.044,90	121.668.834,10	118,71	
4 1 4 11 05 01	a. Rumah Sakti Umum Daerah Labuang Baji	44.115.668,12	37.788.532,23	15.575,40	15.575,40	53.363.935,63	120,96	
4 1 4 11 05 02	b. Rumah Sakti Umum Haji	27.376.796,31	17.072.860,39	13.646,52	13.646,52	30.721.484,50	112,22	
4 1 4 11 05 03	c. Rumah Sakti Ibu dan Anak Siti Fatimah	13.500.000,00	10.388.631,42	4.477,19	4.477,19	14.845.826,34	109,97	
4 1 4 11 05 04	d. Rumah Sakti Ibu dan Anak Peniw	17.500.000,00	14.393.719,40	8.343,96	8.343,96	22.737.587,80	129,93	
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran Cicilan Penjualan	86.808.000,00	30.808.408,00	-	-	20.069.408,00	23,27	
4 1 4 13 01	Angsuran Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah	15.000.000,00	20.809.408,00	-	-	20.069.408,00	133,40	
4 1 4 13 02	Angsuran Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Daerah	71.000.000,00	-	-	-	-	-	
4 2	DANA PEREMBAHAN	1.575.574,37	1.457.077,54	74.308.699,90	74.308.699,90	1.531.386.249,82	97,20	
4 2 1	BAGI HASIL PAJAK BAGI HASIL BUKAN PAJAK	292.999,14	192.746,44	56.064,57	56.064,57	246.811.019,82	84,92	
4 2 1 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	252.219,31	164.105,02	54.023,77	54.023,77	218.129.274,25	86,48	
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan	72.406,11	47.491,88	24.101,03	24.101,03	71.592.120,13	98,97	
4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN/P21, 25, dan 29)	175.025,86	4.787.653,00	111.826,78	29.665,47	141.492.239,04	80,84	
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.787.653,00	4.787.653,34	257.261,72	257.261,72	5.044.915,09	105,37	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	40.778.217,79	28.640.932,86	2.049.807,84	2.049.807,84	30.681.745,57	75,24	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provot Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.948.642,59	10.816,81	36.263,01	36.263,01	45.860,77	1,54	
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Iuran Telag/Landrent	23.668.343,20	16.568.300,26	16.938.240,00	16.938.240,00	16.938.240,00	70,07	
4 2 1 02 05	Bagi Hasil dari Iuran Ekselebas (Royalty)	14.162.232,00	9.913.862,40	1.844.991,74	1.844.991,74	11.858.554,14	83,73	
4 2 1 02 09	Bagi Hasil Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	1.205.588.741,00	1.205.588.741,00	-	-	1.205.588.741,00	100,00	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	1.205.588.741,00	1.205.588.741,00	-	-	1.205.588.741,00	100,00	
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	72.976.480,00	54.732.356,00	18.244,17	18.244,17	72.976.480,00	100,00	
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus	72.976.480,00	54.732.356,00	-	-	72.976.480,00	100,00	

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET PERUBAHAN TA. 2014							REALISASI SID NOVEMBER	REALISASI BULAN INI	REALISASI BULAN INI % 6/14/15
		1	2	3	4	5	6	7			
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAMA			846,136,777,000.00	840,473,077,860.00	2,174,718,960.00	942,652,526,746.00	99.83			
4 3 1	Pendapatan Hibah			13,512,231,000.00	7,716,315,311.00	2,174,718,960.00	9,891,034,271.00	73.17			
4 3 1 03	Bantuan dari Badan Usaha / Organisasi Lainnya			6,346,206,000.00	5,693,197,061.00	622,196,310.00	6,315,303,371.00	99.51			
4 3 1 03 02	Partisipasi Pihak Ke III			6,346,206,000.00	5,693,197,061.00	622,196,310.00	6,315,303,371.00	99.51			
4 3 1 05	Pendapatan Hibah Luar Negeri			7,171,035,000.00	2,023,116,250.00	1,552,612,650.00	3,575,730,900.00	49.86			
4 3 1 05 03	Pendapatan Hibah dan Donor Lainnya (WISIMP)			7,171,035,000.00	2,023,116,250.00	1,552,612,650.00	3,575,730,900.00	49.86			
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			832,619,466,000.00	932,761,892,475.00	-	932,761,892,475.00	100.02			
4 3 4 01	Tambahan Penghasilan Guru PNSD			832,619,466,000.00	932,761,892,475.00	-	932,761,892,475.00	100.02			
4 3 4 01 02	Dana Penguatan Diseminasi Fisik dan Percepatan Pembangunan			577,500,000.00	577,500,000.00	-	577,500,000.00	100.00			
4 3 4 01 03	Dana Penguatan Informatika dan Prasarana Daerah (DIPID)			-	-	-	-	-			
4 3 4 01 04	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			-	-	-	-	-			
4 3 4 01 05	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			19,041,966,000.00	19,041,966,000.00	-	19,041,966,000.00	100.00			
4 3 4 01 07	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Terpencil			813,000,000,000.00	813,143,406,475.00	-	813,143,406,475.00	100.02			

Makassar, 15 Juni 2015

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sul. Sep
Kepala Bidang Perencanaan

(1/1)

DARMAYANUS, MSi
NIP. 19661218 199403 2 007

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN T.A. 2015		REALISASI S/D BLN. LALU	REALISASI DESEMBER	REALISASI S/D BULAN INI		%
		3	4			5	6 (R.S.)	
4 1 1	PENDAPATAN	6.445.779.161.295,00	5.661.722.180.615,14	444.092.914.942,37	6.106.815.995.857,51	94,73		
4 1 1	PAJAK DAERAH	3.432.899.249.296,00	2.846.865.635.951,14	423.978.878.465,37	3.270.828.311.466,51	95,28		
4 1 1		3.067.992.891.500,00	2.850.748.317,13,00	341.497.297.958,00	2.962.245.605,97,00	94,61		
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	984.284.250.000,00	898.412.706.160,00	96.177.138.669,00	997.589.844.229,00	100,37		
4 1 1 01 01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	423.071.720.000,00	394.163.363.783,00	52.975.771.513,00	437.140.136.298,00	103,33		
4 1 1 01 02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1.484.850.000,00	1.246.234.160,00	350.415.000,00	1.596.849.160,00	107,53		
4 1 1 01 03	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	1.090.400.000,00	668.152.900,00	76.064.000,00	1.044.216.800,00	95,75		
4 1 1 01 04	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	176.444.100.000,00	159.556.634.803,00	18.108.940.520,00	177.665.575.323,00	100,69		
4 1 1 01 05	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	13.695.000.000,00	12.897.698.940,00	1.831.754.500,00	14.729.411.390,00	107,55		
4 1 1 01 06	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	4.712.650.000,00	3.550.616.110,00	290.109.892,00	3.852.926.321,00	81,76		
4 1 1 01 07	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)							
4 1 1 01 08	E- Sepeda Motor, Scooter	271.252.800.000,00	234.222.757.613,00	23.057.165.875,00	257.279.943.186,00	94,85		
4 1 1 01 09	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	4.183.200.000,00	3.773.394.000,00	826.937.500,00	4.599.331.500,00	109,95		
4 1 1 01 10	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	201.450.000,00	195.794.250,00	59.170.000,00	254.964.250,00	126,96		
4 1 1 01 11	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	1.612.850.000,00	1.612.850.000,00	1.612.850.000,00	1.612.850.000,00	100,00		
4 1 1 01 12	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	1.467.250.000,00	1.467.250.000,00	1.467.250.000,00	1.467.250.000,00	100,00		
4 1 1 01 13	E- Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1.382.840.000,00	1.240.905.100,00	291.849.500,00	1.538.754.600,00	109,10		
4 1 1 02	Pajak Kendaraan Di Atas Air							
4 1 1 02 01	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.105.209.809.899,86	638.795.849.753,00	134.389.242.168,85	863.100.162.849,86	87,14		
4 1 1 02 02	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	3.870.000.000,00	375.148.658.000,00	75.732.435.000,00	450.881.092.800,00	84,38		
4 1 1 02 03	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1.870.000.000,00	1.147.869.750,00	340.208.000,00	1.488.077.750,00	79,58		
4 1 1 02 04	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	2.620.000.000,00	1.684.086.000,00	198.020.000,00	1.883.100.000,00	71,67		
4 1 1 02 05	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	2.201.000.000,00	1.503.630.500,00	198.020.000,00	1.983.100.000,00	66,62		
4 1 1 02 06	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	150.500.000.000,00	105.698.598.700,00	17.379.657.500,00	122.868.248.250,00	81,80		
4 1 1 02 07	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	3.200.000.000,00	2.820.000.000,00	320.000.000,00	2.940.000.000,00	91,88		
4 1 1 02 08	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	4.200.000.000,00	3.844.897.893,00	389.676.500,00	3.984.574.393,00	92,49		
4 1 1 02 09	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)							
4 1 1 02 10	E- Sepeda Motor, Scooter	348.009.000.000,00	288.871.838.650,00	29.162.423.950,00	318.054.263.600,00	91,39		
4 1 1 02 11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	17.075.000.000,00	13.272.370.000,00	3.181.410.000,00	16.453.780.000,00	83,09		
4 1 1 02 12	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	1.800.000.000,00	1.787.895.000,00	540.000.000,00	1.927.895.000,00	107,15		
4 1 1 02 13	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	4.800.000.000,00	7.897.895.000,00	3.302.590.000,00	11.198.985.000,00	231,43		
4 1 1 02 14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	20.000.000,00	29.047.500,00	82.849.246,00	111.896.746,00	559,23		
4 1 1 02 15	E- Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	5.625.000.000,00	4.720.112.500,00	758.520.000,00	5.478.632.500,00	97,40		
4 1 1 04	Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air							

KODE REKENING	URAIAN			TARGET PERUBAHAN T.A. 2015	REALISASI SID BUN LALU	REALISASI DEBITER	REALISASI SID KREDIT	%
	1	2	3					
4 1 05		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	542.847.901.500,00	487.894.933.936,00	47.433.850.770,00	335.320.784.366,00	96,61	
4 1 05 01		Benalu/ Premium	324.899.305.000,00	290.816.109.811,00	26.809.316.124,00	317.625.425.735,00	97,82	
4 1 05 02		Pemajak/Promot	13.692.725.000,00	12.530.535.634,00	1.213.629.266,00	13.744.163.900,00	98,43	
4 1 05 03		Pemajak Plus	203.880.550.000,00	182.006.544.395,00	10.354.246.609,00	192.427.191.001,00	23,42	
4 1 05 04		Gas	456.384.500,00	82.911.421,00	57.520.563,00	139.531.694,00	-	
4 1 05 05		Pertamax Dex	-	1.225.968.194,00	963.574.568,00	1.899.542.762,00	-	
4 1 05 06		PrismaLite	-	1.000.000.000,00	800.000.000,00	1.200.000.000,00	-	
4 1 05 07		Bo Diesel	-	140.017.500,00	130.182.800,00	270.200.384,00	-	
4 1 06		Pajak Pengambilan dan Pemertanian Air Permukiman	105.080.800.000,00	86.640.746.033,00	2.542.361.493,00	99.183.099.526,00	94,39	
4 1 06 01		Pajak Pengambilan dan Pemertanian Air Permukiman	105.080.800.000,00	86.640.746.033,00	2.542.361.493,00	99.183.099.526,00	94,39	
4 1 09		Pajak Rokok	410.000.000.000,00	339.000.029.171,00	58.040.894.439,00	397.040.724.601,00	96,84	
4 1 09 01		Pajak Rokok	410.000.000.000,00	339.000.029.171,00	58.040.894.439,00	397.040.724.601,00	96,84	
4 1 2		RETRIBUSI DAERAH	93.119.020.200,00	84.007.524.851,00	10.396.887.668,00	94.314.412.699,00	101,26	
4 1 2 01		Retribusi Jasa Umum	70.093.420.000,00	68.372.133.818,00	6.716.448.343,00	75.090.572.161,00	107,13	
4 1 2 01 01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	54.235.300.000,00	55.102.239.918,00	5.530.344.343,00	60.641.584.261,00	111,81	
		- Administrasi / Karach	348.075.000,00	372.768.150,00	39.327.700,00	412.095.850,00	118,05	
		- Tindakan / Operasi	69.800.000,00	69.800.000,00	27.897.300,00	336.880.200,00	91,46	
		- Rawat Inap Umum	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	100,00	
		- Rawat Jalan Umum	1.593.175.000,00	1.303.315.393,00	100.574.600,00	1.403.889.993,00	88,17	
		- Obat-obatan	23.053.838.828,00	23.741.244.855,00	2.460.993.026,00	26.209.837.881,00	113,69	
		- PHD / Akses / Jamkesmas / Jamkesda / Jamkesok	14.899.533.096,00	13.199.036.377,00	1.399.020.749,00	14.598.055.128,00	97,90	
		a. Akses Sosial	11.000.000,00	10.433.990.370,00	1.054.001.677,00	11.487.996.455,00	142,97	
		b. Pelayanan Kesehatan Gerdas	99.000.000,00	117.593.760,00	21.279.600,00	139.104.360,00	139,66	
		c. Akses Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	-	
		d. Jamkesok	-	-	-	-	-	
		- Laboratorium	3.345.000.000,00	3.203.043.200,00	187.273.730,00	3.459.436.500,00	103,15	
		- Radiologi	617.500.000,00	715.597.000,00	80.799.000,00	798.317.000,00	128,96	
		- Rontgen	18.735.828.200,00	19.640.040.944,00	1.898.785.845,00	21.538.826.789,00	28,00	
		- Jase Konsumsi Medik	15.995.000,00	10.545.000,00	1.035.000,00	17.580.000,00	109,91	
		- Jase Pelayanan Kesehatan Lainnya	4.549.881.872,00	5.438.444.476,00	699.279.600,00	6.137.724.076,00	134,90	
		- Klam Akses, Jamkesda, Jamkesmas dan Jamkesok Thn. 2014	1.572.105.000,00	1.291.454.800,00	247.705.000,00	1.539.248.000,00	97,99	
		Retribusi Pengambilan Biaya Cetak Peta	14.258.820.000,00	11.874.469.000,00	3.019.500,00	12.893.969.000,00	90,37	
		Retribusi Pelayanan Perumahan	22.075.600.200,00	14.963.847.633,90	3.453.888.515,00	18.417.736.148,90	83,47	
		Retribusi Jasa Usaha	16.942.770.200,00	11.334.400.733,00	21.234.003.315,00	13.459.444.668,00	78,27	
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD)	650.000.000,00	319.200.380,00	31.997.400,00	351.200.780,00	54,04	
		Retribusi Temporal Perizinan dan Usaha Ragu	310.000.000,00	208.774.000,00	8.615.000,00	316.789.000,00	102,19	
		Retribusi Pemakaian Produk Usaha Daerah	90.000.000,00	2.901.049.500,00	1.288.872.000,00	4.189.722.300,00	100,40	
		Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	771.833.300,00	135.759.800,00	907.644.100,00	98,54	
		Retribusi Jasa Usaha	90.000.000,00	771.833.300,00	135.759.800,00	907.644.100,00	98,54	
		Retribusi Izin Usaha Perdagangan	50.000.000,00	68.598.000,00	3.800.000,00	72.398.000,00	150,97	

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN T.A. 2015			REALISASI SID BLN. LALU	REALISASI DESEMBER	REALISASI SID BULAN INI	%
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							
4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal (BUMD)			89.014.396.746,00	80.982.667.486,94	-	80.982.667.486,94	90,96
4 1 3 01 01	Pemas Sub-SBI			488.884.632,00	456.655.100,00	-	456.655.100,00	93,41
4 1 3 01 02	Bagian Laba Keuangan Bank			86.929.541.904,00	86.929.541.904,04	-	86.929.541.904,04	100,00
4 1 3 02	Bagian Laba Penyertaan Modal (BUMN)			1.395.870.290,00	1.395.870.482,00	-	1.395.870.482,00	100,00
4 1 3 02 01	PT. KIMIA			859.000,00	859.000,00	-	859.000,00	100,00
4 1 3 02 03	PT. ASKRIDA			536.870.290,00	536.871.482,00	-	536.871.482,00	100,00
4 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH			183.062.270.890,00	113.111.723.010,20	72.174.702.789,37	185.286.425.799,57	101,21
4 1 4 01	Hasil Rejabahan Asad Daerah Yang Tidak Ditukarkan			1.113.000,00	1.275.316.998,00	5.899.850,00	1.281.216.848,00	115,11
4 1 4 01 03	Perjualan Perakator perkapas Lector yang tidak terpakai			125.000,00	95.998.998,00	6.070,00	102.069.998,00	81,66
4 1 4 01 05	Perjualan Mekan Air-sabit berat tidak terpakai			25.000,00	21.386.600,00	-	21.216.550,00	84,87
4 1 4 01 06	Perjualan Kendaraan Roda Dua			983.000,00	1.157.999.600,00	(170,00)	1.157.929.600,00	120,24
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro			26.000.000,00	18.853.154.587,80	1.578.972.718,34	20.432.127.286,14	78,59
4 1 4 02 01	Jasa Giro Pemegang Kas			26.000.000,00	17.974.508.749,80	1.431.251.151,34	19.405.759.901,14	74,64
4 1 4 02 03	Jasa Giro Dana BOS			-	482.123,00	147.721.567,00	1.025.865.382,00	-
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			-	876.163.895,00	-	876.163.895,00	-
4 1 4 04 01	Kerugian Uang			-	2.234.255.801,65	20.433.800,00	2.254.691.401,65	-
4 1 4 04 02	Kerugian Barang			-	-	-	-	-
4 1 4 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			-	759.896.025,00	1.457.025.847,78	2.216.921.872,78	-
4 1 4 06 01	Bidang Pendidikan			-	-	-	-	-
4 1 4 06 02	Bidang Kesehatan			-	39.347.005,00	509.253.780,00	548.601.285,00	-
4 1 4 06 03	Bidang Pekerjaan Umum			-	711.718.120,00	840.801.742,47	1.552.319.862,47	-
4 1 4 06 04	Bidang Pemukiman Rakyat			-	-	-	-	-
4 1 4 06 05	Bidang Pertambangan			-	-	-	-	-
4 1 4 06 07	Bidang Penanaman Modal			-	-	-	-	-
4 1 4 06 16	Bidang Kebudayaan			-	-	-	-	-
4 1 4 06 18	Bidang Kepemudaan dan Olah raga			-	-	-	-	-
4 1 4 06 19	Bidang Pekerjaan Umum			-	1.894.860,00	7.625.102,00	9.519.912,00	-
4 1 4 06 21	Bidang Kerjasama			-	-	-	-	-
4 1 4 06 22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			-	239.720,00	9.282.091,31	9.521.811,31	-
4 1 4 06 26	Bidang Pertanian			-	6.615.620,00	87.335.082,00	93.968.802,00	-
4 1 4 06 30	Bidang Kelautan dan Perikanan			-	-	2.910.000,00	2.910.000,00	-
4 1 4 06 31	Bidang Perindustrian dan Perdagangan			-	-	-	-	-

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET PERUBAHAN T.A. 2015		REALISASI SID BLN. LALU	REALISASI DESEMBER	REALISASI SID BULAN INI	%
		3	4				
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak	37.500.000,000.00	32.489.746.889,00	3.856.653.948,00	6.143,1	36.378.400,035.00	96,87
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda P K B	36.000.000,000.00	31.384.619.792,00	3.737.443.002,00	97,56	35.122.062,644.00	97,56
4 1 4 10 01	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000,000.00	1.094.126.097,00	119.210,894,00	1.203,37	1.203,37,191.00	80,22
4 1 4 10 02	Pengembalian Pajak Penghasilan	-	2.562,362,235,89	14,643,074,840,25	-	17,208,437,176,14	-
4 1 4 10 03	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	-	178,229,750,00	625,420,00	-	178,855,170,00	-
4 1 4 10 04	Pengembalian dari Uang Muka	-	842,769,394,89	14,454,274,421,25	-	15,302,047,816,14	-
4 1 4 10 05	Pengembalian dari Restitusi Denda GDS	-	1,336,363,091,00	186,171,099,00	-	1,724,534,190,00	-
4 1 4 10 07	Pengembalian dari Sisa Pengembalian Kds	-	-	-	-	-	-
4 1 4 11 01	Facilitas Sosial dan Fasilitas Umum	658.602,725.00	697,041,153,00	364,746,966,00	161,22	1,061,788,119,90	161,22
4 1 4 11 02	Facilitas umum	658.602,725.00	697,041,153,00	364,746,966,00	161,22	1,061,788,119,90	161,22
4 1 4 11 04	Hasil Penjualan kerja sama bangun Guna Serah (BGS) Discovery park	156.602,725.00	156,602,725,00	156,602,725,00	100,00	156,602,725,00	100,00
4 1 4 11 05	Leih Lain Penerimaan Yang Saha	500.000,000.00	539,438,428,00	359,146,966,00	180,54	903,185,394,00	180,54
4 1 4 11 05	Sisdu Layanan Umum Daerah	117,715,668,125,00	54,239,037,004,86	50,249,602,656,00	89,76	104,487,539,669,96	89,76
4 1 4 11 05	a. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Bai	46,615,668,125,00	20,120,598,969,81	23,060,898,861,00	92,53	43,181,267,830,81	92,53
4 1 4 11 05	b. Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah	15,000,000,000.00	6,174,474,262,05	5,417,052,207,00	77,28	11,591,500,669,05	77,28
4 1 4 11 05	c. Rumah Sakit Umum Haji	35,000,000,000.00	17,147,899,009,00	12,212,377,012,00	83,99	29,360,276,421,00	83,99
4 1 4 11 05	d. Rumah Sakit Ibu dan Anak Periw	21,100,000,000.00	10,796,064,364,00	9,559,400,576,00	96,47	20,354,454,840,00	96,47
4 1 4 13 01	Pendapatan dari Anggaran/Cicilan Penjualan	75.000,000.00	22,004,235,00	(610,038,00)	28,53	21,394,200,00	28,53
4 1 4 13 01	Anguran/cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah	25.000,000.00	22,004,235,00	(1,831,335,00)	80,69	20,172,900,00	80,69
4 1 4 13 02	Anguran/cicilan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas	30.000,000.00	22,004,235,00	1,221,300,00	2,44	1,221,300,00	2,44
4 1 4 13 02	- Kendaran Bermotor Roda 2	30.000,000.00	-	-	-	-	-
4 1 4 13 02	- Kendaran Bermotor Roda 4	15.000,000.00	-	-	-	-	-
4 2 2 01	DANA PERMBAHAN	1,749,160,455,000.00	1,587,775,754,861,00	1,221,300,00	8,14	1,221,300,00	8,14
4 2 2 01	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	261,792,298,000.00	185,089,195,861,00	2,977,634,550,00	91,41	1,590,754,389,411,00	91,41
4 2 2 01 01	Bagi Hasil Pajak	256,711,515,000.00	167,392,788,859,00	2,977,634,550,00	66,74	188,057,830,411,00	66,74
4 2 2 01 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	78,216,146,000.00	59,489,413,309,00	1,256,508,900,00	66,37	170,379,403,409,00	66,37
4 2 2 01 01 02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan	172,199,847,000.00	103,319,948,260,00	1,721,035,650,00	77,68	60,755,012,209,00	77,68
4 2 2 01 01 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH-Pa.21, 25, dan 29)	6,295,422,000.00	4,574,387,350,00	-	-	-	-
4 2 2 01 01 04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	25,080,783,000.00	17,689,427,092,00	-	-	-	-
4 2 2 01 02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	6.123.000.00	4.982.384.00	-	-	-	-
4 2 2 01 02 01	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.123.000.00	4.982.384.00	-	-	-	-
4 2 2 01 02 02	Bagi Hasil dari Jasa Eksploitasi (Roughly)	16,783,584,000.00	11,733,367,800,00	-	-	-	-
4 2 2 01 02 05	Bagi Hasil dari Jasa Eksploitasi (Roughly)	1,902,854,000.00	1,332,097,800,00	-	-	-	-
4 2 2 01 02 09	Bagi Hasil Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Bumi	1,189,010,167,000.00	1,189,010,167,000,00	-	-	-	-
4 2 2 01 02 09	Dana Alokasi Umum	1,189,010,167,000.00	1,189,010,167,000,00	-	-	-	-
4 2 2 01 02 09	Dana Alokasi Khusus	278,357,990,000.00	222,889,392,000,00	-	-	-	-
4 2 2 01 02 09	Dana Alokasi Khusus	278,357,990,000.00	222,889,392,000,00	-	-	-	-
4 2 2 01 02 09	Dana Alokasi Khusus	278,357,990,000.00	222,889,392,000,00	-	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN T.A. 2015			REALISASI SID	REALISASI	REALISASI SID	%
		3	4	5	DESEMBER	6 (4+5)	BULAN INI	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1,272,820,457,000.00	1,227,995,792,693.00	17,136,401,987.00	1,244,232,194,680.00	97.75		
4 3 1	Pendapatan Hibah	24,664,027,000.00	8,220,628,928.00	17,136,401,987.00	25,357,030,916.00	102.81		
4 3 1 03	Bantuan dari Badan Usaha / Organisasi Lainnya	6,076,500,000.00	5,957,998,958.00	370,688,137.00	6,328,687,096.00	104.15		
4 3 1 03 01	Partisipasi Pihak Ketiga	6,076,500,000.00	5,957,998,958.00	370,688,137.00	6,328,687,096.00	104.15		
4 3 1 01	Bantuan dari Pemerintah	14,898,872,000.00	14,898,872,000.00	14,898,872,000.00	14,898,872,000.00	100.00		
4 3 1 01 01	Penggalangan korban akibat Bencana alam	14,898,872,000.00	14,898,872,000.00	14,898,872,000.00	14,898,872,000.00	100.00		
4 3 1 05	Pendapatan Hibah Luar Negeri	3,688,655,000.00	2,262,629,970.00	1,866,841,650.00	4,129,471,820.00	111.95		
4 3 1 05 03	Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya (WISMP)	3,688,655,000.00	2,262,629,970.00	1,866,841,650.00	4,129,471,820.00	111.95		
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,248,258,430,000.00	1,218,875,163,764.00	-	1,218,875,163,764.00	97.65		
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	1,248,258,430,000.00	1,218,875,163,764.00	-	1,218,875,163,764.00	97.65		
4 3 4 01 02	Dana Pengkajian Guru PNSD	393,000,000.00	393,000,000.00	-	393,000,000.00	100.00		
4 3 4 01 03	Dana Pengkajian Pegawai Eselon dan Peningkatan Pembangunan	-	-	-	-	-		
4 3 4 01 04	Dana Peningkatan Infrastruktur dan Prasana Daerah (DIPPD)	-	-	-	-	-		
4 3 4 01 05	Dana Insentif Daerah (DID)	26,162,830,000.00	26,162,830,000.00	-	26,162,830,000.00	100.00		
4 3 4 01 06	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1,221,700,600,000.00	1,192,319,333,764.00	-	1,192,319,333,764.00	97.60		
4 3 4 01 07	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Terpencil	-	-	-	-	-		

Makassar, 21 Juni 2016
Kepala Dinas Pendapatan Daerah,

Drs. H. JAUTOTO I.R. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
N I P : 19640811 199303 1 006

**LAKSANA DAN REALISASI PENJAJARAN APBD PERUBAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA 2016		REALISASI S/D BULAN		REALISASI S/D BULAN DESEMBER	%
		NOVEMBER	DESEMBER	NOVEMBER	DESEMBER		
4	PENDAPATAN DAERAH	7.383.506.229.703,00	-	6.643.322.016.127,35	519.266.676.055,17	7.162.588.691.182,52	97,27
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.216.797.239.993,00	-	3.070.669.644.644,35	378.891.663.260,17	3.449.561.308.104,52	98,06
4.1.01	PAJAK DAERAH	3.145.435.142.000,00	-	2.728.537.730.334,00	351.104.644.045,00	3.079.682.374.379,00	97,91
4.1.101.01	Pajak Kendaraan Bermotor	1.006.097.680.000,00	-	926.888.877.250,00	186.125.230.248,00	1.026.994.107.478,00	102,06
4.1.101.02	A-1 Sediaan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	500.650.000.000,00	-	458.443.392.488,00	60.472.715.251,00	524.442.365.957,00	104,71
4.1.101.03	A-2 Sediaan, Jeep, Station Wagon (Umum)	7.678.000.000,00	-	4.433.982.488,00	477.477,00	6.842.756.235,00	89,06
4.1.101.04	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.403.000.000,00	-	1.273.774.435,00	387.465.160,00	1.447.499,00	103,42
4.1.101.05	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1.390.000.000,00	-	1.170.412.355,00	87.692.650,00	1.258.105.005,00	91,17
4.1.101.06	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	188.640.000.000,00	-	171.043.424.592,00	17.270.070.987,00	188.313.495.549,00	99,83
4.1.101.07	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	19.000.000.000,00	-	16.362.042.849,00	1.659.833.200,00	18.021.876.049,00	94,85
4.1.101.08	D-1 Kendaraan Khusae (Pribadi)	4.550.000.000,00	-	4.268.626.967,00	381.658.634,00	4.650.285.601,00	102,20
4.1.101.09	D-2 Kendaraan Khusae (Umum)	-	-	-	-	-	-
4.1.101.10	E. Sepeda Motor, Scooter	274.884.200.000,00	-	248.723.440.980,00	23.697.962.425,00	272.321.403.405,00	99,07
4.1.101.11	A-3 Sediaan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	4.575.000.000,00	-	4.159.800.760,00	948.755.550,00	5.138.586.300,00	112,33
4.1.101.12	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	240.000.000,00	-	230.244.125,00	66.365.675,00	296.609.800,00	123,56
4.1.101.13	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	1.590.000.000,00	-	1.551.397.750,00	523.953.375,00	2.075.351.125,00	138,36
4.1.101.14	D-3 Kendaraan Khusae (Dinas)	116.000.000,00	-	110.000.000,00	46.456.796,00	397.717.677,00	339,85
4.1.101.15	E. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1.410.180.000,00	-	1.291.218.500,00	252.876.000,00	1.544.085.000,00	109,50
4.1.103	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	991.412.000.000,00	-	872.917.026.327,69	119.093.295.716,00	992.000.322.043,00	100,00
4.1.103.01	A-1 Sediaan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	488.400.000.000,00	-	434.536.159.873,00	68.327.770.000,00	502.863.920.873,00	102,96
4.1.103.02	A-2 Sediaan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1.200.000.000,00	-	888.762.500,00	14.244.000,00	903.006.500,00	75,21
4.1.103.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.424.500.000,00	-	1.361.000.000,00	80.060.000,00	1.441.060.000,00	101,86
4.1.103.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	598.000.000,00	-	517.776.250,00	86.319.000,00	607.085.250,00	110,36
4.1.103.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	133.480.000.000,00	-	115.107.005.000,00	14.456.087.500,00	128.563.883.000,00	97,07
4.1.103.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	12.810.000.000,00	-	11.664.066.000,00	2.148.640.000,00	13.813.306.000,00	109,54
4.1.103.07	D-1 Kendaraan Khusae (Pribadi)	810.000.000,00	-	1.490.387.504,00	94.345.885,00	1.584.913.389,00	195,67
4.1.103.08	D-2 Kendaraan Khusae (Umum)	-	-	-	-	-	-
4.1.103.09	E. Sepeda Motor, Scooter	325.600.000.000,00	-	294.140.879.700,00	27.965.076.000,00	312.105.965.700,00	95,86
4.1.103.10	A-3 Sediaan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	18.030.000.000,00	-	13.631.140.000,00	3.240.760.000,00	16.872.900.000,00	105,20
4.1.103.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	450.000.000,00	-	546.045.000,00	245.000,00	791.511.000,00	175,86
4.1.103.12	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	5.000.000.000,00	-	4.468.160.000,00	1.706.750.000,00	6.174.910.000,00	123,31
4.1.103.14	D-3 Kendaraan Khusae (Dinas)	40.000.000,00	-	39.568.000,00	35.455.831,00	75.044.331,00	187,11
4.1.103.15	F. Sewenda Motor, Scooter (Dinas)	5.917.500.000,00	-	4.523.314.500,00	678.292.500,00	5.102.607.000,00	86,22

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA 2016	REALISASI S/D BULAN		%
			NOVEMBER	DESEMBER	
4.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	408.697.765.000,00	457.444.075.988,00	591.074.595.663,00	101,04
4.1.1.05.01	Pertamax	203.000.000,00	225.499.068,00	278.054.465.679,00	136,98
4.1.1.05.02	Pertamax Plus	18.200.000,00	18.625.248.824,00	20.192.083.934,00	108,32
4.1.1.05.03	Solar	196.330.000,00	192.063.834,00	89.850.648.944,00	90,59
4.1.1.05.04	Pertamine Dex	96.170.990,00	92.395.119.724,00	493.579.507,00	100,95
4.1.1.05.05	Pertalite	489.940,00	451.882.752,00	41.002.255.200,00	226,28
4.1.1.05.06	Bio Gas	16.120.000,00	33.679.133.792,00	70.143.137.596,00	105,90
4.1.1.05.09	Bio Diesel	66.235.000,00	64.821.181.062,00	314.546.329,00	74,89
4.1.1.05.10	Pertamax Turbo	420.030,00	5.131.915,00	35.923.405,00	103,87
4.1.1.06	Pajak Air Perumahan	72.022.800,00	75.612.454.898,00	74.813.180.695,00	103,67
4.1.1.06.01	Pajak Air Perumahan	72.022.800,00	75.612.454.898,00	74.813.180.695,00	103,67
4.1.1.07	Pajak Rokok	990.000,00	402.715.383.020,00	484.786.158.500,00	83,58
4.1.1.07.01	Pajak Rokok	990.000,00	402.715.383.020,00	484.786.158.500,00	83,58
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	85.538.674,00	402.715.383.020,00	86.532.573.610,00	104,91
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	63.833.420,00	423.474.497,00	86.971.281.422,00	104,91
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	56.994.620,00	56.394.975.166,00	60.866.312.300,00	123,20
4.1.2.01.01.01	- Tindakan / Operasi	702.820,00	799.651.000,00	66.681.300,00	123,20
4.1.2.01.01.02	- Rawat Inap Umum	385.350,00	421.411.800,00	455.197.600,00	118,13
4.1.2.01.01.03	- Rawat Gawat Darurat	637.050,00	622.886.810,00	673.967.668,00	105,73
4.1.2.01.01.04	- Rawat Jalan	1.984.288,200,00	1.443.562.384,00	1.526.683.205,00	96,36
4.1.2.01.01.05	- Rawat Gawat Darurat	17.665.465,947,00	18.152.546.130,00	19.873.964.700,00	112,50
4.1.2.01.01.06	- Jamkesmas	137.400,00	133.350.600,00	177.981.500,00	129,54
4.1.2.01.01.07	- Asuransi Kesehatan lainnya	3.879.450,00	4.042.017.340,00	4.300.226.600,00	110,85
4.1.2.01.01.08	- Laboratorium	692.160,00	592.072.000,00	7.476.000,00	94,67
4.1.2.01.01.09	- Radiologi	5.375,00	1.530.000,00	7.195.200,00	133,97
4.1.2.01.01.10	- Ambulance	5.375,00	1.530.000,00	7.195.200,00	133,97
4.1.2.01.01.11	- Jasa Kesehatan Lainnya	25.021.678.250,00	18.249.450.577,00	20.069.579.095,00	79,97
4.1.2.01.01.12	- Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya	15.300,00	30.615.000,00	116.444.529,00	761,08
4.1.2.01.01.13	- Lain-lain Pelayanan, Tenaga Uling	6.278.312.803,00	11.870.856.325,00	11.870.856.325,00	189,69
4.1.2.01.01.14	Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.285.200,00	5.091.160,00	5.299.200,00	100,59
4.1.2.01.01.15	Retribusi Jasa Usaha	20.663.356,800,00	15.666.969.341,00	18.091.794.988,00	87,81
4.1.2.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.300,00	11.342.850.411,00	12.734.601.458,00	84,86
4.1.2.02.01	Retribusi Pelayanan Kepabupaten	290.000,00	290.000,00	389.401.620,00	103,83
4.1.2.02.04	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4.857.000,00	3.896.349.650,00	4.078.237.910,00	94,34
4.1.2.02.08	Retribusi Perijinan/Produksi Usaha Daerah	1.100.000,00	1.310.969.800,00	1.488.600,00	135,30
4.1.2.03	Retribusi Perbinan Tertentu	900.000,00	790.976.100,00	888.278.000,00	98,70
4.1.2.03.01	Retribusi Ijin Trayek	100.000,00	242.840.000,00	272.565.000,00	272,57
4.1.2.03.02	Retribusi Ijin Usaha	100.000,00	242.840.000,00	272.565.000,00	272,57
4.1.2.03.03	Retribusi IMTA	100.000,00	278.253.800,00	308.742.600,00	308,74

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA.2016	REALISASI/SID BULAN NOVEMBER	REALISASI BULAN DESEMBER	REALISASI/SID BULAN DESEMBER	%
4.1.3	HASIL PENG. KEK. DAERAH YANG DIPISAHKAN	106,759,669,458.00	106,807,751,666.00	251,916,790.00	106,759,669,458.00	100.00
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Peny. Modal pada Perusahaan, Milik Daerah / (BUMD)	105,298,044,428.00	105,046,128,038.00	251,916,790.00	105,298,044,428.00	100.00
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	501,916,790.00	250,000,000.00	-	501,916,790.00	100.00
4.1.3.01.02	PT. Bank Sulsel	104,796,128,038.00	104,796,128,038.00	-	104,796,128,038.00	100.00
4.1.3.02	BUMN	-	-	-	-	-
4.1.3.03	Bagian Laba Atas Peny. Modal pada Perusahaan, Milik Negara / Swasta	1,461,623,630.00	1,461,623,630.00	-	1,461,623,630.00	100.00
4.1.3.03.01	PT. KIMA	223,561,800.00	223,561,800.00	-	223,561,800.00	100.00
4.1.3.03.02	PT. GMTD	594,000,000.00	594,000,000.00	-	594,000,000.00	100.00
4.1.3.03.03	PT. ASKRIDA	644,061,830.00	644,061,830.00	-	644,061,830.00	100.00
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	179,663,752,725.00	156,110,700,435.35	20,496,001,822.17	176,606,702,257.52	98.63
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	727,550,000.00	1,826,977,500.00	-	1,826,977,500.00	223.62
4.1.4.01.02	Penj. Penul. / Pelelang. Kenop. Tidak Tempakai	11,000,000.00	-	-	-	-
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin Alat-Alat Berat Tidak Tempakai	12,000,000.00	13,010,000.00	-	13,010,000.00	108.42
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	704,550,000.00	1,650,640,500.00	-	1,650,640,500.00	221.51
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	-	53,327,000.00	-	53,327,000.00	-
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	-	26,193,491,039.05	-	26,193,491,039.05	118.30
4.1.4.02	Jasa Giro	24,000,000,000.00	25,423,913,502.05	2,170,160,193.12	28,392,158,709.17	114.98
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	-	9,542.00	-	9,542.00	-
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	-	28,506,757.00	-	28,506,757.00	-
4.1.4.02.04	Jasa Giro Dana BOS	-	1,286,276,965.30	-	1,286,276,965.30	-
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	-	1,286,276,965.30	-	1,286,276,965.30	-
4.1.4.04.01	Keugian Uang Daerah	-	179,445,176.00	-	179,445,176.00	-
4.1.4.04.02	Keugian Binang Daerah	-	-	-	-	-
4.1.4.05	Pend.Denda Atas Keterlamb. Pelak. Pekerjaan	-	-	-	-	-
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang	-	-	-	-	-
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan	-	-	-	-	-
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
4.1.4.06.15	Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-	-
4.1.4.06.17	Bidang Kependidikan dan Olah Raga	-	-	-	-	-
4.1.4.06.19	-	-	-	31,204,102.00	31,204,102.00	-

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA. 2016	REALISASI S/D BULAN NOVEMBER	REALISASI BULAN DESEMBER	REALISASI S/D BULAN DESEMBER	%
4.1.4.06.20	Bidang Pemerintahan Umum		4.704.000,00	160.000,00	4.864.000,00	-
4.1.4.06.21	Bidang Kepagawean		-	-	-	-
4.1.4.06.22	Bidang Perencanaan Masyarakat		-	7.462.300,00	7.462.300,00	-
4.1.4.06.23	Bidang Perencanaan		-	-	-	-
4.1.4.06.28	Bidang Energi & SDM		311.460,00	64.146.759,00	64.458.219,00	-
4.1.4.06.30	Bidang Kelautan dan Perikanan		-	-	-	-
4.1.4.06.31	Bidang Perindustrian dan Perdagangan		-	-	-	-
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	38.225.000,000,00	27.190.294.256,00	4.386.603.973,00	31.556.898.229,00	82,56
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	36.000.000,000,00	26.106.826.236,00	4.195.346.969,00	30.302.173.205,00	82,79
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Bas Baik Nama Kendaraan Bermotor	1.625.000,000,00	1.083.458.020,00	171.257.004,00	1.254.715.024,00	77,21
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian		8.729.763.740,00	2.851.293.432,00	11.581.077.172,00	-
4.1.4.10.01	Pend. dari Pengemb. Pajak Penghasilan Pasal 21		320.451.776,00	11.707.910,00	332.159.686,00	-
4.1.4.10.03	Pend. dari Pengemb. Kelebihan Pemb. Gaji & Tunjangan		-	-	-	-
4.1.4.10.04	Pend. dari Pengemb. Kelebihan Pemb. Perjalanan Dinas		6.890.396.116,00	123.731.036,00	7.014.067.151,00	-
4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka		1.515.995.846,00	2.715.854.567,00	4.234.850.413,00	-
4.1.4.10.06	Pengembalian dari Sisa Pengembalian Dana BOS		-	-	-	-
4.1.4.10.07	Pengembalian dari Sisa Pengembalian Kas		-	-	-	-
4.1.4.11	Facilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.908.602,725,00	1.321.564.821,00	108.206.992,05	1.429.771.813,05	-
4.1.4.11.01	Facilitas Umum	158.602,725,00	-	-	-	-
4.1.4.11.02	Sumbangan Pihak Ketiga	1.750.000,000,00	1.321.564.821,00	108.206.992,05	1.429.771.813,05	81,70
4.1.4.11.03	Lain Lain Penerimaan Yang Sah		-	-	-	-
4.1.4.11.04		696.600,000,00	-	-	-	-
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	6.000,000,00	7.323.090,00	-	7.323.090,00	-
4.1.4.13.01	Angsuran / Cicilan Penj. Rumah Dinas Daerah	2.500,000,00	5.292.000,00	-	5.292.000,00	211,28
4.1.4.13.02	Angsuran / Cicilan Penj. Kend. Perorangan Dinas	3.500,000,00	2.041.090,00	-	2.041.090,00	58,32
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
4.1.4.14.01	Dari Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
4.1.4.14.01.01	Revolving		-	-	-	-
4.1.4.15	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	113.500,000,000,00	89.573.553.046,00	6.454.681.777,00	96.028.234.825,00	86,37
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Lebuaug Baji	38.000,000,000,00	23.894.251.700,00	280.461.297,00	30.264.713.057,00	79,64
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	37.000,000,000,00	27.590.697.756,00	4.897.569.457,00	32.458.267.215,00	87,73
1.02.05	Rumah Sakit Umum Daerah Ibu dan Anak Fallimah	15.000,000,000,00	12.724.624.541,00	1.072.399.456,00	13.797.023.997,00	91,98
1.02.06	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pentwi	23.500,000,000,00	19.303.978.959,00	2.204.251.597,00	21.508.230.555,00	91,52

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA. 2016	REALISASI SID BULAN NOVEMBER	REALISASI BULAN DESEMBER	REALISASI SID BULAN DESEMBER	%
4.2	DANA TRANSFER	3.834.773.537.720,00	3.565.703.632.891,00	139.113.041.080,00	3.704.816.673.861,00	96,61
4.2.1	DANA PERMIBANGGAN	3.829.773.537.720,00	3.560.703.632.891,00	139.113.041.080,00	3.699.816.673.861,00	96,61
4.2.1.1	DANA TRANSFER UMUM	1.665.809.734.720,00	1.671.479.549.106,00	37.072.335.080,00	1.708.491.884.186,00	102,57
4.2.1.1.01	DANA BAGI HASIL	271.491.373.720,00	277.331.168.106,00	37.072.335.080,00	314.343.523.186,00	115,78
4.2.1.1.01.01	Bagi Hasil Pajak	230.827.467.200,00	230.743.616.873,00	1.060.000,00	231.803.624.773,00	100,42
4.2.1.1.01.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	46.414.505.000,00	57.002.599.702,00	-	57.002.599.702,00	122,81
4.2.1.1.01.01.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (Phg) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	178.380.323.000,00	169.864.102.254,00	-	169.864.102.254,00	94,59
4.2.1.1.01.01.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.032.636.200,00	4.056.944.817,00	1.080.000,00	5.116.952.817,00	101,86
4.2.1.1.01.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	40.663.806.520,00	46.587.571.533,00	35.952.326.880,00	82.539.898.413,00	202,88
4.2.1.1.01.02.01	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	52.993.000,00	126.574.223,00	-	126.574.223,00	238,85
4.2.1.1.01.02.02	Dana Bagi Hasil dari Provdi SDA Mineral dan Batubara	28.266.869.072,00	36.988.757.272,00	35.952.326.880,00	72.939.084.152,00	257,77
4.2.1.1.01.02.02.01	- Iuran/Retor/Landfill	3.127.096.072,00	2.327.544.272,00	-	2.327.544.272,00	74,43
4.2.1.1.01.02.02.02	- Iuran Eksploitasi/Royalty	26.139.473.000,00	34.661.213.000,00	35.952.326.880,00	70.610.539.880,00	267,83
4.2.1.1.01.02.03	DBH dari Sektor Pertambangan Gas Bumi	11.344.344.448,00	10.075.240.039,00	-	10.075.240.039,00	88,81
4.2.1.1.02	DANA ALOKASI UMUM	1.394.148.361.000,00	1.394.148.361.000,00	-	1.394.148.361.000,00	100,00
4.2.1.1.02.01	Dana Alokasi Umum	1.394.148.361.000,00	1.394.148.361.000,00	-	1.394.148.361.000,00	100,00
4.2.1.2	DANA TRANSFER KHUSUS	2.164.133.803.000,00	1.899.224.083.475,00	102.100.706.000,00	1.991.324.789.475,00	92,01
4.2.1.2.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	443.109.954.000,00	241.794.509.000,00	102.100.706.000,00	343.895.215.000,00	77,59
4.2.1.2.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.720.933.849.000,00	1.647.428.574.475,00	-	1.647.428.574.475,00	95,73
4.2.2	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	83,33
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.929.452.000,00	6.946.738.702,00	226.000.000,00	8.210.709.417,00	68,93
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	6.946.738.702,00	226.000.000,00	8.210.709.417,00	68,93
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Rekomendasi Pihak Berwenang	-	-	226.000.000,00	226.000.000,00	100,00
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dan Pemerintah Bantuan Penderitaan Rehabilitasi	-	-	-	-	-
4.3.1.03	Pend. Hibah dari Badan/Lemb./Org.Swasta dalam Negeri	6.414.675.000,00	6.096.188.002,00	384.560.315,00	6.474.748.917,00	100,94
4.3.1.03.01	Badan/Lemb./Org. Swasta (Partisipasi Pihak Ketiga)	6.414.675.000,00	6.096.188.002,00	384.560.315,00	6.474.748.917,00	100,94
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	5.514.777.000,00	858.550.100,00	651.410.400,00	1.509.960.500,00	27,38
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah dari Donor Laimnet/WISMP)	5.514.777.000,00	858.550.100,00	651.410.400,00	1.509.960.500,00	27,38

Masukkan 2016
Ke dalam Kolom Keterangan
Maka akan tertera
DUMAYAN, S.L.M.J.
Pangkat : P e m b i n a T K.
N. P. : 196121610602007

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN APBD PERUBAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA 2017		REALISASI S/D BULAN	REALISASI BULAN	REALISASI S/D BULAN	%
		SEPTEMBER	OKTOBER	SEPTEMBER	OKTOBER	OKTOBER	
4	PENDAPATAN DAERAH	9.261.774.631.860,00	9.320.126.613.388,42	9.320.126.613.388,42	1.376.824.671.173,81	7.688.851.184.532,23	82,95
4.1	Pajak Daerah	3.318.446.620.631,00	2.899.824.726.482,00	2.899.824.726.482,00	406.868.234.466,81	2.967.106.194.532,23	79,26
4.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.106.046.000.000,00	787.275.147.883,00	787.275.147.883,00	391.220.063.198,00	2.991.044.789.877,00	76,36
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor	1.106.046.000.000,00	787.275.147.883,00	787.275.147.883,00	391.220.063.198,00	2.991.044.789.877,00	76,36
4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	500.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	52.000.000,00	480.000.000,00	80,00
4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	9.531.600.000,00	7.631.368.775,00	7.631.368.775,00	190.760.033,00	8.000.000,00	80,04
4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.500.000.000,00	1.023.451.075,00	1.023.451.075,00	180.690.700,00	1.214.144.775,00	80,84
4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1.400.000.000,00	1.254.139.450,00	1.254.139.450,00	163.840.650,00	1.417.979.100,00	101,29
4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	200.000.000.000,00	132.166.007.848,00	132.166.007.848,00	17.271.419.675,00	149.439.427.653,00	74,72
4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	22.200.000.000,00	18.005.427.897,00	18.005.427.897,00	3.057.676.325,00	21.068.103.322,00	94,60
4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	4.000.000.000,00	2.751.278.894,00	2.751.278.894,00	1.980.046.385,00	4.247.322.199,00	106,19
4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	288.434.400.000,00	191.412.534.586,00	191.412.534.586,00	26.741.258.055,00	218.163.790.641,00	75,63
4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter	5.040.000.000,00	3.260.375.100,00	3.260.375.100,00	47.686.925,00	3.332.071.025,00	74,05
4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	342.000.000,00	177.588.875,00	177.588.875,00	14.926.425,00	192.296.300,00	56,23
4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	1.990.000.000,00	1.094.903.975,00	1.094.903.975,00	195.787.725,00	1.270.691.700,00	67,23
4.1.1.01.12	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	1.000.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00	211.750.000,00	831.750.000,00	83,17
4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	1.700.000.000,00	890.024.500,00	890.024.500,00	164.837,00	1.054.491.360,00	62,03
4.1.1.01.13	E. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	982.932.000.000,00	622.108.614.288,00	622.108.614.288,00	88.921.844.264,00	740.222.860.648,00	76,00
4.1.1.03.01	Bea Balik Negeri Kendaraan Bermotor	483.300.000.000,00	324.981.740.340,00	324.981.740.340,00	41.314.774.000,00	386.296.514,00	79,73
4.1.1.03.02	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	200.000.000,00	117.430.000,00	117.430.000,00	314.600.000,00	433.030.000,00	216,02
4.1.1.03.03	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1.296.000.000,00	863.045.000,00	863.045.000,00	90.115.000,00	1.043.160.000,00	80,65
4.1.1.03.04	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.400.000.000,00	1.241.991.500,00	1.241.991.500,00	82.500.000,00	1.324.491.500,00	94,61
4.1.1.03.05	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	138.000.000.000,00	82.814.018.000,00	82.814.018.000,00	10.025.220.000,00	92.839.238.000,00	67,27
4.1.1.03.06	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	1.000.000.000,00	9.852.607.669,00	9.852.607.669,00	2.111.268.444,00	11.969.411.000,00	93,36
4.1.1.03.07	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.320.000.000,00	852.607.669,00	852.607.669,00	211.268.444,00	1.063.876.113,00	80,59
4.1.1.03.08	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	330.800.000.000,00	217.292.504.000,00	217.292.504.000,00	30.357.026.800,00	247.649.529.800,00	74,91
4.1.1.03.09	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	9.000.000.000,00	7.391.760.000,00	7.391.760.000,00	2.373.625.000,00	9.765.405.000,00	108,50
4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	500.000.000,00	548.800.000,00	548.800.000,00	448.030.000,00	548.800.000,00	60,98
4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	5.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	448.030.000,00	4.748.030.000,00	71,49
4.1.1.03.12	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	40.000.000,00	21.233.760,00	21.233.760,00	8.426.510,00	29.660.270,00	74,16
4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	3.892.000.000,00	2.790.500.500,00	2.790.500.500,00	958.475.000,00	3.748.975.500,00	104,60
4.1.1.03.13	E. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	546.000.000.000,00	408.846.067.308,00	408.846.067.308,00	82.246.237.916,00	491.092.305.224,00	84,44
4.1.1.06.01	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	238.000.000.000,00	171.324.190.281,00	171.324.190.281,00	18.224.668.380,00	197.548.848.641,00	76,93
4.1.1.05.01	Pertamax	28.000.000.000,00	21.980.326.788,00	21.980.326.788,00	2.737.354.533,00	24.717.681.321,00	88,98
4.1.1.05.02	Pertamax Plus	210.000.000.000,00	149.343.863.513,00	149.343.863.513,00	15.487.313.847,00	172.831.167.488,00	84,69

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA 2017	REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER	REALISASI BULAN OKTOBER	REALISASI S/D BULAN OKTOBER	%
4.1.1.05.04	Solar	99.000.000,00	71.107.465,407,00	9.023.431,271,00	80.930.896,678,00	81,75
4.1.1.05.06	Pertanahan	700.050.000,00	495.343.772,00	55.679.517,00	651.023.289,00	74,71
4.1.1.05.07	Pertanah	114.844.720.000,00	93.198.156.850,00	17.034.530.333,00	110.200.689.683,00	95,96
4.1.1.05.08	Biogas	52.400.000.000,00	48.299.704.457,00	5.894.729.301,00	55.194.433.758,00	88,40
4.1.1.05.10	Perikanan	330.440.000,00	291.535.336,00	78.552.791,00	769.391.315,00	87,88
4.1.1.05.11	Perikanan Tambak	330.440.000,00	291.535.336,00	78.552.791,00	769.391.315,00	87,88
4.1.1.05.11	Perikanan Tambak	330.440.000,00	291.535.336,00	78.552.791,00	769.391.315,00	87,88
4.1.1.05.11	Perikanan Tambak	330.440.000,00	291.535.336,00	78.552.791,00	769.391.315,00	87,88
4.1.1.06	Pajak Air Permukiman	79.423.000,00	63.900.342,143,00	18.892.304,413,00	82.792.646,556,00	104,24
4.1.1.06.01	Pajak Air Permukiman	79.423.000,00	63.900.342,143,00	18.892.304,413,00	82.792.646,556,00	104,24
4.1.1.07	Pajak Rokok	690.000.000,00	317.899.755,881,00	127.852.368,240,00	445.752.124,121,00	74,19
4.1.1.07.01	Pajak Rokok	690.000.000,00	317.899.755,881,00	127.852.368,240,00	445.752.124,121,00	74,19
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	91.292.381,897,00	66.741.127,390,20	2.862.832,673,00	63.884.059,863,20	69,74
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	88.387.320,000,00	46.377.273,316,00	1.207.118,950,00	47.584.392,266,00	71,83
4.1.2.01.01	- Tarif Pemukiman (Kesehatan)	55.049.320,000,00	43.824.773,316,00	1.204.619,950,00	45.029.393,266,00	81,85
4.1.2.01.01.01	- Retribusi Jalan	507.330,000,00	367.751,100,00	27.759,500,00	590.445,100,00	83,62
4.1.2.01.01.02	- Retribusi Sampah	585.650,000,00	616.380,650,00	44.129,050,00	664.509,700,00	73,18
4.1.2.01.01.03	- Retribusi Parkir	1.209.395,000,00	1.119.284,115,00	114.599,150,00	1.233.883,265,00	102,11
4.1.2.01.01.04	- Retribusi Pasar	17.471,168,197,00	15.119.023,239,00	210.422,050,00	15.329.445,289,00	87,74
4.1.2.01.01.05	- Retribusi Jasa Lainnya	80.100,000,00	47.094,600,00	8.754,000,00	55.848,600,00	69,72
4.1.2.01.01.06	- Retribusi Jasa Lainnya	4.150.620,000,00	3.329.799,200,00	293.341,250,00	3.623.140,450,00	87,25
4.1.2.01.01.07	- Retribusi Jasa Lainnya	676.650,000,00	467.792,000,00	54.920,400,00	522.712,400,00	77,25
4.1.2.01.01.08	- Retribusi Jasa Lainnya	375.000,000,00	30.000,000,00	90.000,000,00	90.000,000,00	24,00
4.1.2.01.01.09	- Retribusi Jasa Lainnya	23.329.535,500,00	13.504.966,634,00	454.092,950,00	13.959.061,584,00	59,86
4.1.2.01.01.10	- Retribusi Jasa Lainnya	6.990.203,300,00	8.004.628,960,00	1.170,000,00	9.174,628,960,00	130,54
4.1.2.01.01.11	- Retribusi Jasa Lainnya	11.336.000,000,00	2.562.500,000,00	72.500,000,00	2.635.000,000,00	23,15
4.1.2.01.01.12	- Retribusi Jasa Lainnya	22.707.091,897,00	12.607.213,672,20	1.416.947,823,00	13.974.161,495,20	61,54
4.1.2.01.01.13	- Retribusi Jasa Lainnya	19.511.671,897,00	8.669.474,227,20	998.554,094,00	9.629.028,312,20	57,97
4.1.2.02.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah	375.000,000,00	375.000,000,00	48.897,325,00	423.897,325,00	100,00
4.1.2.02.04	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.270.300,000,00	3.207.592,218,00	396.099,414,00	3.603.691,632,00	57,63
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.198.000,000,00	1.846.840,000,00	158.864,800,00	2.005.704,800,00	91,24
4.1.2.02.06	Retribusi Perumahan Terentu	1.000.000,000,00	453.278,000,00	40.330,000,00	493.608,000,00	49,34
4.1.2.03	Retribusi Lain-lain	900.000,000,00	1.002.960,000,00	40.330,000,00	1.043.290,000,00	113,60
4.1.2.03.02	Retribusi Iklan	900.000,000,00	1.002.960,000,00	40.330,000,00	1.043.290,000,00	113,60
4.1.2.03.03	Retribusi Iklan	900.000,000,00	1.002.960,000,00	40.330,000,00	1.043.290,000,00	113,60
4.1.3	MASIL PENG. KEK. DAERAH YANG DIPISAHKAN	123.095.915,497,00	126.859.886,496,83	126.859,886,496,83	126.859,886,496,83	100,00
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Peny. Modal Pdt. Penusah. Milik Daerah (BUMD)	123.095.915,497,00	126.859.886,496,83	126.859,886,496,83	126.859,886,496,83	100,00
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	345.550,000,00	123.249.267,986,83	123.249,267,986,83	123.249,267,986,83	99,72
4.1.3.01.02	PT. Bank Sialit	123.249.267,987,00	123.249,267,986,83	123.249,267,986,83	123.249,267,986,83	100,00

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA 2017	REALISASI SID BULAN SEPTEMBER	REALISASI SID BULAN OKTOBER	%
4.1.3.02	Bagian Laba Atas Peny. Modal Pd. Perusah. Milik Negara / BUMN	-	1,410,618,510.00	1,410,618,510.00	-
4.1.3.03	Bagian Laba Atas Penyort Modal pada Perusah. Milik Swasta	1,410,618,510.00	406,383,960.00	406,383,960.00	100.00
4.1.3.03.01	PT. GATD	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	100.00
4.1.3.03.02	PT. ASGRIDA	774,234,541.00	674,234,541.00	674,234,541.00	100.00
4.1.4	LANJUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	206,861,332,337.00	184,172,219,804.39	11,666,238,689.81	85.49
4.1.4.01	Hasil Peny. Asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	750,000,000.00	218,875,000.00	218,875,000.00	29.18
4.1.4.01.02	Penj. Perai / Pering. Kambor Tidak Terpakai	25,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	8.00
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin Alat-Alat Berat Tidak Terpakai	25,000,000.00	5,225,000.00	5,225,000.00	20.90
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	700,000,000.00	211,650,000.00	211,650,000.00	30.24
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	-	-	-	-
4.1.4.02	Jasa Giro	36,000,000,000.00	29,624,630,943.67	2,871,600,889.81	93.42
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	36,000,000,000.00	29,624,630,943.67	2,871,600,889.81	93.42
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pengepung Kas	-	29,086,452,247.57	31,848,012,707.38	80.69
4.1.4.02.04	Jasa Giro Dana BOS	-	308,726.00	308,726.00	-
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	-	735,759,960.00	111,960,330.00	-
4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	-	3,880,672,473.36	1,640,888.00	-
4.1.4.04.02	Pend. Daerah Atas Keterlamb. Pajak. Pekerjaan	-	3,880,672,473.36	1,640,888.00	-
4.1.4.04.03	Bidang Kesehatan	-	4,211,270.00	7,068,888.00	-
4.1.4.04.04	Bidang Pekerjaan Umum	-	-	848,288.00	-
4.1.4.04.05	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	-
4.1.4.04.06	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	-
4.1.4.04.07	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	-
4.1.4.04.08	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	-
4.1.4.04.09	Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-
4.1.4.04.10	Bidang Kebudayaan	-	-	-	-
4.1.4.04.11	Bidang Kependidikan dan Olah raga	-	-	-	-
4.1.4.04.12	Bidang Pekerjaan Umum	-	80,000.00	80,000.00	-
4.1.4.04.21	Bidang Koperasi	-	-	-	-
4.1.4.04.22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	4,131,270.00	6,217,700.00	-
4.1.4.04.28	Bidang Energi & SDM	-	-	-	-
4.1.4.04.29	Bidang Perikanan	-	-	-	-
4.1.4.04.31	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	44,376,000,000.00	31,821,786,817.00	4,619,886,842.80	81.46
4.1.4.07.01	Pend. Denda Bas Balik Nama Kend. Bermotor	40,000,000,000.00	30,393,387,844.00	4,440,520,202.00	87.08
4.1.4.07.02	Pend. Denda Bas Balik Nama Kend. Bermotor	4,376,000,000.00	1,128,392,973.00	179,366,760.00	29.89

KODE REKENING	JENIS PEREMBAKAN	TARGET PENJABAHAN TA 2017		REALISASI SID BULAN SEPTEMBER		REALISASI SID BULAN OKTOBER		REALISASI SID BULAN OKTOBER		%
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian			11.482.321,616,46	63.729.312,00	11.546.090,827,46				
4.1.4.10.01	Pend. dari Pengemb. Pajak Penghasilan Pasal 21								163.794.476,00	
4.1.4.10.04	Pend. dari Pengemb. Kelebihan Pemb. Pejt. Dinas			133.016,934,00	30.776.542,00					
4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka			7.282.019,316,46	14.639.100,00				7.282.659.416,46	
4.1.4.10.06	Pengembalian dari Pengembalian Dana BOS			4.067.269,265,00	10.311.870,00				4.066.997.935,00	
4.1.4.10.07	Pengembalian dari Sisa Pengembalian Kas									
4.1.4.11	Facilitas Sosial dan Fasilitas Umum	158.602.725,00		620.612,368,00	546.440,798,00	1.167.063,164,00			1.167.063,164,00	735,84
4.1.4.11.01	Facilitas Sosial									
4.1.4.11.02	Facilitas Umum	158.602.725,00		620.612,368,00	546.440,798,00	1.167.063,164,00			1.167.063,164,00	
4.1.4.11.03	Sarana Prasarana Kelapa									
4.1.4.11.04	Lain Lain Perumahan Yeng Sah									
4.1.4.12	Pend. dari Peny. Pendidikan dan Pelatihan									
4.1.4.13	Pendapatan dari Anggaran / Cicilan Penjab. Rumah Dinas Daerah	35.000.000,00		14.339.330,00						
4.1.4.13.01	Anggaran / Cicilan Penjab. Rumah Dinas Daerah	15.000.000,00		4.300.000,00						
4.1.4.13.02	Anggaran / Cicilan Penjab. Kend. Perorangan Dinas	20.000.000,00		10.039.330,00						
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergilir									
4.1.4.14.01	Dari Kelompok Masyarakat									
4.1.4.14.01.01	Revolving									
4.1.4.15	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	125.245.699,612,00		61.684.852,977,00						
1.01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Labung Bai	39.557.019,773,00		35.032.626,691,00						
1.01.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	39.542.879,639,00		23.294.330,669,00						
1.01.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Ibu dan Anak Palman	15.050.000,000,00		7.696.227,614,00						
1.01.02.05	Rumah Sakit Umum Daerah Ibu dan Anak Perini	8.392.000,000,00		14.149.942,971,00						
1.01.02.07	Rumah Sakit Umum Syarif Rasyid	8.392.000,000,00		8.392.000,000,00						
4.2	DANA TRANSFER	5.025.650.037,099,00		3.746.363,477,048,00						
4.2.1	DANA PERMBAIKAN	5.019.160.037,099,00		3.740.863,477,048,00						
4.2.1.1	DANA TRANSFER UMUM	2.841.434.177,099,00		2.327.448.468,068,00						
4.2.1.1.01	DANA BAGI HASIL	331.954.922,099,00		227.632.822,068,00						
4.2.1.1.01.01	Bagi Hasil Pajak	281.994.244,099,00		219.658.543,121,00						
4.2.1.1.01.01.01	Bagi Hasil dari Beas Perti. Har. atas Tenah Bangunan	45.704.703,099,00		30.231.022,299,00						
4.2.1.1.01.01.02	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.471.123,000,00								
4.2.1.1.01.01.04	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	209.845.143,000,00		185.009.895,521,00						
4.2.1.1.01.02	Bagi Hasil dari PSDHDBH SDA DR Kabupaten	49.958.878,000,00		37.954.278.947,00						
4.2.1.1.01.02.01	DBH dari Proyek SDA Mineral dan Batubara	35.034.244,000,00		440.442.884,00						
4.2.1.1.01.02.02	-Jurus Tebay Landroet	4.843.971,000,00		3.506.911,510,00						
4.2.1.1.01.02.03	-Jurus Esapobesir (Royalty)	31.065.273,000,00		21.943.965,552,00						
4.2.1.1.01.02.04	DBH dari Sektor Perkebunan Gas Bumi	13.937.359,000,00		12.783.454,009,00						

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET PERUBAHAN TA 2017	REALISASI BULAN		REALISASI BULAN OKTOBER	%
			SEPTEMBER	OKTOBER		
4.2.1.02	DANA ALOKASI UMUM	2.659.480.285.000,00	1.889.825.674.900,00	289.937.290.000,00	2.239.652.884.000,00	83,24
4.2.1.02.01	Dana Alokasi Umum	2.659.480.285.000,00	1.889.825.674.900,00	289.937.290.000,00	2.239.652.884.000,00	83,24
4.2.1.2	DANA TRANSFER KHUSUS	418.580.358.000,00	1.981.453.841.900,00	791.061.818.800,00	2.218.376.498.700,00	82,76
4.2.1.2.01	Dana Alokasi Khusus Fiskal	418.580.358.000,00	1.981.453.841.900,00	791.061.818.800,00	2.218.376.498.700,00	82,76
4.2.1.2.02	Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	2.293.134.502.000,00	1.328.281.041.900,00	67.384.271.000,00	1.846.535.115,00	54,44
4.2.2	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.775.473.980,00	10.325.076.315,00	144.203.448,00	10.469.279.763,00	81,92
4.3.1	Pendapatan Hibah	12.775.473.980,00	10.325.076.315,00	144.203.448,00	10.469.279.763,00	81,92
4.3.1.01	Pend. Hibah dari Pemerintah Atas Penanggulangan Korban Akibat Bencana Alam	450.000.000,00	450.000.000,00	-	450.000.000,00	100,00
4.3.1.01	Pend. Hibah dari Bend.Lemb.Org.Swela dim Negeri	8.795.802.120,00	5.278.883.395,00	144.203.448,00	5.423.087.440,00	78,76
4.3.1.03.01	Bantuan/Lemb.Org. Swasta (Panti, Panti Kelapa)	9.794.602.120,00	5.275.883.995,00	144.203.448,00	5.420.097.440,00	78,76
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	5.533.671.830,00	4.599.181.320,00	-	4.898.181.320,00	85,11
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya(WISMP)	5.533.671.830,00	4.599.181.320,00	-	4.898.181.320,00	85,11

Mekasar, 2017
 an, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah,

DARMAYANI, BH, M.Si
 Pengantar : P a m b i n a T K I
 N I P . : 19661218 199403 2 007

L
A
M
P
I
R
A
N













PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3323/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1667/Izn-5/C.4-VIII/VII/37/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HASNAWATI
Nomor Pokok : 105730475514
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juli s/d 21 September 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. AP. PETTARANI NO. 1 TLP. (0411) 872164 - 872648 FAX. (0411) 854010
MAKASSAR Kode Pos 90221

NOTA DINAS

DARI : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL
KEPADA : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
NOMOR : 070/1494/Bapenda
TANGGAL : 2 Agustus 2018
PERIHAL : IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 3323/S.01/PTSP/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal izin Penelitian Mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

N a m a : HASNAWATI
Nomor Pokok : 105730475514
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : JL. Sultan Alauddin No,259, Makassar

Untuk selanjutnya dapat difasilitasi dalam melaksanakan penelitian / pengambilan data mulai tanggal 21 Juli s/d 21 September 2018 pada Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah dengan judul "**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**" dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan agar mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

KEMAL REDINDO SYAHRUL PUTRA,SH.,MH

Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19810907 200901 1 006



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 013/05/C.4-II/VI/39/2018
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 29 Syawal 1439 H
13 Juli 2018 M

Kepada Yth.
Ketua LP3M Unismuh Makassar

di-
Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Hasnawati**
Nim : **105730475514**
Jurusan : **Akuntansi**
Judul Penelitian : **Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pendataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih

D e k a n ,

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM. 903 078,-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

RIWAYAT HIDUP



Hasnawati lahir di Bonerate, Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Mei 1994 dari Pasangan Ayahanda Bakri dan Ibunda Sitti. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara. Pendidikan Formal Penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri Bonerate dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 1 Pasimarannu dan lulus pada tahun 2011, kemudian pendidikan dilanjutkan kembali ke tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMA Negeri 1 Pasimarannu yang sekarang berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Selayar dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus dari SMA Negeri 6 Selayar, penulis melanjutkan Studi S1 pada tahun 2014 di Perguruan Tinggi Swasta ternama di Sulawesi Selatan yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan mengambil konsentrasi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis